

### PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 September 2024 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 September 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)

### PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 September 2024 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim	6



### SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG

# TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM PADA TANGGAL

# 30 SEPTEMBER 2024 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2023 (DIAUDIT) SERTA UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Winarto

Alamat kantor

: Jl. Lodan Timur No. 7 Gedung Ecovention Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara

Nomor Telepon

: (021) 6453456-6454567

Alamat domisili sesuai KTP

: Komp. Diskum AD Blok B No. 26

atau kartu identitas lain

RT/RW 001/012

Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara

Jakarta Timur

Jabatan

: Direktur Utama

2. Nama

: Daniel Nainggolan

Alamat kantor

: Jl. Lodan Timur No. 7 Gedung Ecovention Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara

: (021) 6453456-6454567

Nomor Telepon Alamat domisili sesuai KTP

: Jl. Cereme 38 Cilandak RT/RW 005/003 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak

atau kartu identitas lain Kel. Cilandak E Jakarta Selatan

Jabatan

: Direktur

#### Menyatakan bahwa:

- 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim:
- 2. Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan konsolidasian interim tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- 3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Oktober 2024

Direktur Utama

Direktur

(Winarto)

(Daniel Nainggolan)

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol Jakarta Utara - 14430 www. ancol.com

J& EJ

### PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	30 September 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3, 39, 43	269.015	411.446
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	4, 39, 43	2.712	9.531
Pihak Ketiga	4, 43	48.749	52.706
Piutang Lain-lain			
Pihak Berelasi	5, 43		17.781
Pihak Ketiga		5.987	8.296
Persediaan	6	7.185	6.057
Uang Muka	7	18.471	1.777
Pajak Dibayar di Muka	8.a	26.387	4.518
Biaya Dibayar di Muka	10	17.546	4.596
Aset Lain-lain	19	2.573	2.573
Jumlah Aset Lancar		398.625	519.281
ASET TIDAK LANCAR			
Uang Muka			3.536
Aset Pajak Tangguhan	8.d	579	579
Investasi pada Ventura Bersama	11	5.488	5.815
Investasi pada Entitas Asosiasi	12	26.236	29.596
Investasi Jangka Panjang Lainnya	13, 43	128.936	128.936
Aset Real Estat	14	276.236	280.043
Properti Investasi	15	200.753	206.274
Aset Tetap	16	2.499.051	2.455.802
Aset Hak Guna	17	63.969	78.963
Aset Takberwujud	18	20.708	21.510
Aset Lain-lain	19	7.080	13.085
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.229.036	3.224.139
JUMLAH ASET		3.627.661	3.743.420

Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	30 September 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	19, 39, 43	840	840
Pihak Ketiga	19	12.631	11.327
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga		14.286	15.422
Utang Pajak	8.b	28.578	141.705
Beban Akrual dan Provisi	22, 43	193.545	218.363
Liabilitas Jangka Panjang yang			
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Utang Bank	23, 43		40.919
Liabilitas Sewa	17	4.785	3.126
Utang Obligasi	24, 43		149.568
Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan	25	132.048	116.695
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		386.713	697.965
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi			
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Utang Bank	23, 43	243.788	617.196
Utang Obligasi	24, 43	564.645	65.213
Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan	25	302.994	289.638
Liabilitas Sewa	17	82.424	97.079
Liabilitas Pajak Tangguhan	8.d	149.943	145.863
Jaminan Pelanggan dan Deposit Lainnya	26	19.913	13.397
Liabilitas Imbalan Kerja	27	160.266	148.829
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.523.973	1.377.215
JUMLAH LIABILITAS		1.910.686	2.075.180
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal Saham			
Modal Dasar sebesar 5.759.999.998			
saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dengan nilai nomin			
masing-masing Rp500 (Rupiah penuh) per saham serta 5.759.999.99	6 saham		
seri C dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar			
1.599.999.998 saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B			
dan 1.599.999.996 saham seri C	28	400.000	400.000
Tambahan Modal Disetor	29	40.404	40.404
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya		44.810	42.458
Belum Ditentukan Penggunaannya		1.346.285	1.299.242
Penghasilan Komprehensif Lain	13	(137.371)	(137.371)
Komponen Ekuitas Lainnya		2.427	2.427
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		1.696.555	1.647.160
Kepentingan Nonpengendali	30	20.420	21.080
JUMLAH EKUITAS		1.716.975	1.668.240
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.627.661	3.743.420

### PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Sembilan Bulan Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

		er	
	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	31, 39	881.446	902.565
Beban Pokok Pendapatan	32	(29.654)	(27.469)
Beban Langsung	32	(413.451)	(383.158)
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	<u> </u>	(443.105)	(410.627)
LABA BRUTO		438.341	491.938
Pendapatan Bunga		14.211	18.686
Pendapatan Lainnya	34	12.903	23.330
Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih	16		10
Beban Umum dan Administrasi	33	(183.772)	(165.409)
Beban Penjualan	33	(24.637)	(16.349)
Kerugian Selisih Kurs - Bersih		(329)	(124)
Beban Lain-lain	35	(18.327)	(14.250)
Jumlah Beban Usaha	_	(199.951)	(154.106)
LABA USAHA		238.390	337.832
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	12	734	1
Bagian Rugi Bersih Investasi Ventura Bersama	11	(326)	(528)
Beban Keuangan	36	(76.357)	(74.249)
Beban Pajak Final	9	(19.027)	(11.499)
LABA SEBELUM PAJAK		143.414	251.557
Beban Pajak Penghasilan	8.c	(43.479)	(81.913)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	_	99.935	169.644
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u></u>	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAI	N	99.935	169.644
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DA DIATRIBUSIKAN KEPADA:	PAT		
Pemilik Entitas Induk		100.595	170.801
Kepentingan Nonpengendali	30	(660)	(1.157)
JUMLAH	<u> </u>	99.935	169.644
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	_		
Pemilik Entitas Induk		100.595	170.801
Kepentingan Nonpengendali	30	(660)	(1.157)
JUMLAH	<u> </u>	99.935	169.644
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	37	63	107

### PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode Sembilan Bulan Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

		_	Tambahan	Modal Disetor	Saldo Laba						
	Catatan	Modal	Agio	Selisih antara	Ditentukan	Belum Ditentukan	Penghasilan	Komponen	Jumlah	Kepentingan	Jumlah
		Disetor	Saham	Aset dan Liabilitas	Penggunaannya	Penggunaannya *)	Komprehensif Lain	Ekuitas Lainnya		Nonpengendali	Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022		400.000	36.709	3.695	40.916	1.144.401	(82.182)	2.427	1.545.966	14.963	1.560.929
Laba Bersih Periode Berjalan	•					170.801	-		170.801	(1.157)	169.644
Saldo per 30 September 2023	•	400.000	36.709	3.695	40.916	1.315.202	(82.182)	2.427	1.716.767	13.806	1.730.573
Pembentukan Cadangan Umum	38	-			1.542	(1.542)					
Dividen	38					(46.400)			(46.400)		(46.400)
Laba Bersih Tahun Berjalan						235.173			235.173	6.133	241.306
Kerugian Komprehensif Lain Tahun Berjalan						(32.390)	(55.189)		(87.579)	(16)	(87.595)
Saldo per 31 Desember 2023	,	400.000	36.709	3.695	42.458	1.299.242	(137.371)	2.427	1.647.160	21.080	1.668.240
Pembentukan Cadangan Umum	38				2.352	(2.352)					
Dividen	38					(51.200)			(51.200)		(51.200)
Laba Bersih Periode Berjalan						100.595			100.595	(660)	99.935
Saldo per 30 September 2024	,	400.000	36.709	3.695	44.810	1.346.285	(137.371)	2.427	1.696.555	20.420	1.716.975

### PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM

Untuk Periode September Bulan Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

		30 Septem	ber
	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			_
Penerimaan dari Pelanggan		922.364	941.448
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(459.425)	(428.545)
Pembayaran kepada Karyawan		(167.256)	(149.024)
Kas Dihasilkan dari Operasi	_	295.683	363.879
Pendapatan Bunga		14.211	18.686
Penerimaan Klaim Asuransi		2.533	5.918
Pembayaran Pajak		(150.556)	(36.254)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan		(76.357)	(69.502)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	_	85.514	282.727
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi	12	21.876	3.000
Perolehan Aset Tetap	16	(123.916)	(66.693)
Perolehan Aset Takberwujud	18	(5.482)	(6.807)
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya - Bersih	19	5.926	3.207
Pencairan Deposito Berjangka			2.489
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	_	(101.596)	(64.804)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Liabilitas Sewa	17	(8.570)	(7.500)
Penerimaan Utang Bank	23	100.000	
Pembayaran Utang Bank	23	(516.000)	
Penerimaan Utang Obligasi	24	501.689	
Pembayaran Utang Obligasi	24	(149.600)	
Pembayaran Penerbitan Utang Obligasi	24	(2.668)	
Pembayaran Dividen	38	(51.200)	(46.400)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	_	(126.349)	(53.900)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA	KAS	(142.431)	164.023
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		411.446	506.061
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		269.015	670.084

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### 1. Umum

#### 1.a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 10 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris pengganti Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian telah diperbaharui dengan Akta No. 98 tanggal 22 Agustus 1992 dan Akta No. 134 tanggal 8 September 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. C2-7514.HT.01.01. TH.92 tanggal 11 September 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 Nopember 1992, Tambahan No. 6071. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 90 tanggal 24 Agustus 2020 dibuat oleh Aulia Taufani, S.H.,Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0158739.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020.

Pada awalnya, dalam rangka pengembangan kawasan Ancol sebagai kawasan wisata terpadu, pada tahun 1966, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI) menunjuk PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya (PT Pembangunan Jaya) sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol (BPP Ancol) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya No. 1b/3/1/26/1966 tanggal 19 Oktober 1966. Pada tahun 1966, Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial. Pada tanggal 10 Juli 1992, status BPP Ancol diubah menjadi suatu badan hukum, yaitu menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol, dengan komposisi kepemilikan sahamnya adalah Pemda DKI sebesar 80% dan PT Pembangunan Jaya sebesar 20%.

Sesuai dengan pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain dapat bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya, dan pengembang wilayah pemukiman;
- Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Pada saat ini Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") berusaha dalam bidang:

- Real estat, yaitu pembangunan, penjualan dan penyewaan bangunan dan penjualan tanah kaveling;
- Pariwisata, termasuk mengelola taman bermain dan arena rekreasi, pasar seni dan dermaga.

Perusahaan tergabung dalam Jaya Grup. PT Pembangunan Jaya merupakan pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas induk utamanya.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Ecovention, Jl. Lodan Timur No. 7 Kel. Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

### 1.b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 14 Desember 2023 dari Notaris Aulia Taufani S.H., susunan pengurus Perusahaan masing-masing pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

30 September 2024 dan 31 Desember 2023

Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil \*)
Komisaris : Yohannes Henky Wijaya
Suhardi Alius

<sup>\*)</sup> Merangkap sebagai Komisaris Independen

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

30 September 2024 dan 31 Desember 2023

Direktur Utama : Winarto

Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso

Daniel Nainggolan Eddy Prastiyo

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan nomor 001/KOM-PJA/III/2023, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

30 September 2024 dan 31 Desember 2023

Ketua : Sofyan A. Djalil
Anggota : Teti Eko Pratiwi
Loso Judiianto

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

30 September 2024 dan 31 Desember 2023

Sekretaris Perusahaan : Agung Praptono

Ketua Satuan Pengendalian Internal Perusahaan pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

30 September 2024 dan 31 Desember 2023

Ketua : Farida Kusuma R

Jumlah karyawan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah 581 dan 599 karyawan (tidak diaudit).

#### 1.c. Entitas Anak

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan Entitas Anak secara bersama - sama disebut sebagai "Grup".

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak sebagai berikut:

Entitas	Domisili	Jenis Usaha	Tahun	Persentase	30 Septe	ember 2024	31 D	es 2023
Anak			Operasi Komersial	Kepemilikan %	Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih
PT Taman Impian Jaya Ancol (PT TIJA)	Jakarta	Pariwisata	1972	99,99	3.038.608	152.603	3.177.022	388.880
PT Seabreez Indonesia (PT SI)	Jakarta	Pariwisata, Perdagangan dan Jasa	1972	96,57	42.440	(444)	42.297	814
PT Jaya Ancol (PT JA) PT Sarana Tirta Utama (PT STU)	Jakarta Jakarta	Pariwisata Jasa, Penjernihan dan Pengelolaan air bersih, Limbah, Penyaluran dan pendistribusian air bersih	2009 2010	100 65,00	12.833 28.084	232 (2.146)	11.154 30.603	(4) (3.539)
PT Jaya Ancol Pratama Tol (PT JAPT)	Jakarta	Pembangunan Tol dan Jasa	2011	60,00	11.663	250	29.201	18.354

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Entitas	Domisil	i Jenis Usaha	Tahun	Persentase	30 Septe	ember 2024	31 D	es 2023
Anak			Operasi Komersial	Kepemilikan %	Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	Jumlah Aset	Jumlah Laba (Rugi) Bersih
PT Taman Impian (TI)				70	Aset	(11.09.) 20.0	Aset	(1149.) 2010
	Jakarta	Pariwisata	2012	100	11.061	(50)	10.856	581
PT Genggam Anugerah Lumbung Kuliner	Jakarta	Jasa Konsultan	2012	100	463	(33)	506	(45)

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta.

PT TIJA mengelola pintu gerbang, taman dan pantai, dunia fantasi, kolam renang, pertunjukan binatang, penginapan wisata, dan penjualan *merchandise*.

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham PT TIJA menyetujui untuk menerbitkan 1.179 lembar saham baru nilai nominal seluruhnya senilai Rp117.937, dan sehubungan dengan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor akan berubah dari sebesar Rp5.721 menjadi Rp6.700. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHUAH. 01.03-0440151 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Modal dasar PT TIJA sebesar Rp689.998 ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.899 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (Rupiah penuh) per saham, dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,9999976% atau sebanyak 6.899. saham dengan nilai sebesar Rp689.998.
- PT Pembangunan Jaya memiliki 0,0000024% atau sebanyak 168 saham dengan nilai sebesar Rp16.800 (Rupiah penuh).

PT SI mengelola penginapan wisata dan sarana transportasi di Kepulauan Seribu, restoran, dan penyewaan lahan.

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 13 Januari 2022 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pemegang saham PT SI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan menerbitkan 844.214 lembar saham baru dengan nominal seluruhnya sebesar Rp21.105, yang diambil bagian oleh:

- Perusahaan sebesar Rp20.846;
- Tn. Slamet Budisukrisno sebesar Rp9;
- PT TIJA sebesar Rp68; dan
- Tn. Wardiman sebesar Rp182.

Akta perubahan di atas telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHUAH. 01.03-0075810 tanggal 3 Februari 2022.

Dengan demikian, persentase kepemilikan Perusahaan dan PT TIJA pada PT SI berubah menjadi masing-masing sebesar 97,81% dan 0,32%.

PT JA bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2011, PT JA bersama dengan PT Jaya Konstruksi Pratama Tol mendirikan PT Jaya Ancol Pratama Tol (JAPT) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 60% dan 40%.

PT STU bergerak di bidang jasa pengelolaan air bersih, khususnya menyelenggarakan penjernihan dan pengelolaan air bersih dan limbah, pengadaan dan penyaluran dan pendistribusian air bersih. Perusahaan bersama dengan PT Jaya Teknik Indonesia (PT JTI) mendirikan PT STU dengan kepemilikan masing-masing sebesar 65% dan 35%.

PT TI bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2012, PT TIJA bersama dengan PT JA mendirikan PT Taman Impian (PT TI) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99% dan 1%.

Berdasarkan akta No.1 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta 1 April 2021, ruang lingkup kegiatan PT GALK adalah jasa konsultasi manajemen. Pada tahun 2014, PT TI mengakuisisi 70% kepemilikan di PT GALK, sebelumnya entitas asosiasi, dan PT JA menambah kepemilikan 5% di

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT GALK sehingga Perusahaan secara tidak langsung memiliki PT GALK 100%. Pada tahun 2021 PT GALK berdasarkan Akta No. 21 tanggal 23 Februari 2021 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., tentang perubahan anggaran dasar, menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar 3.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000 menjadi 3.820 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.820, yang diambil bagian oleh PT TI sebesar Rp3.629 dan PT JA sebesar Rp191. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0128568. tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021.

#### 1.d. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 22 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-1915/PM/2004 untuk melakukan penawaran umum atas 800.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 2 Juli 2004 saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 31 Juli 2005, sejumlah saham Perusahaan seri C sejumlah 799.999.998 lembar saham telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 13 April 2006 para pemegang saham memutuskan pemecahan nilai nominal setiap saham seri C dari Rp500 menjadi Rp250 per saham. Sehingga jumlah saham seri C berubah menjadi 1.599.999.996 lembar saham.

#### 1.e. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Perusahaan juga telah menerbitkan obligasi dengan jumlah nilai masing-masing sebesar Rp496.060 pada tahun 2024, Rp731.000 pada tahun 2021, Rp269.000 pada tahun 2019 serta Rp1.000.000 pada tahun 2018 dan 2016 yang dibagi atas 4 (empat) seri obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Obligasi	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga	Pemeringkat	Peringkat	Tenor	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Status
1	Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016								
	Seri A	250.000	8,10%	PEFINDO	id AA-	3 Tahun	20-Sep-16	29-Sep-19	Lunas
	Seri B	50.000	8,20%	PEFINDO	id AA-	5 Tahun	20-Sep-16	29-Sep-21	Lunas
2	Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018								
	Seri A	350.000	6,30%	PEFINDO	id AA-	370 Hari	18-Mei-18	23-Mei-19	Lunas
	Seri B	350.000	7,60%	PEFINDO	id AA-	3 Tahun	18-Mei-18	18-Mei-21	Lunas
3	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019								
		269.000	7,85%	PEFINDO	id A+	370 Hari	02-Jul-19	12-Jul-20	Lunas
4	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021								
	Seri A	516.000	7,25%	PEFINDO	id A	370 Hari	10-Feb-21	20-Feb-22	Lunas
	Seri B	149.600	8,90%	PEFINDO	id A	3 Tahun	10-Feb-21	10-Feb-24	Lunas
	Seri C	65.400	9,60%	PEFINDO	id A	5 Tahun	10-Feb-21	10-Feb-26	Belum Lunas
5	Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024								
	Seri A	446.030	8,50%	PEFINDO	id A+	3 Tahun	09-Juli-24	9-Jul-27	Belum Lunas
	Seri B	20.010	8,75%	PEFINDO	id A+	5 Tahun	09-Juli-24	9-Jul-29	Belum Lunas
	Seri C	37.020	9,00%	PEFINDO	id A+	7 Tahun	09-Juli-24	9-Jul-31	Belum Lunas

#### 2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

#### 2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atauperusahaan publik.

#### 2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

# 2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Periode Berjalan

Pada tanggal 1 Januari 2024, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efekti sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan revisi tidak menghasilkan perubahan besar tehadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- i. PSAK 201: Penyajian Laporan
- ii. PSAK 116: Sewa
- iii. PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

### 2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada (Catatan 1.c).

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

#### 2.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor:
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai entitas induk utama.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

#### 2.f. Instrumen Keuangan

#### Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

#### Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuanganyang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari asset keuangan.

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
  - (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika asset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar asset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

#### Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
  - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
  - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

(a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda: atau
- (b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

#### Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrument keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- (ii) Nilai waktu uang; dan

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

(iii) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrument keuangan dianggap rendah ketika asset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, asset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menggunakan metode roll rate untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

#### Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

#### Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, asset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

#### Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir tahun pelaporan dimana perpindahan terjadi.

#### 2.g. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

#### 2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas tunai, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

#### 2.i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya sebagian akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

### 2.j. Aset Real Estat

Aset real estat berupa tanah kosong, tanah hasil pengembangan, tanah reklamasi, rumah tinggal, rumah kantor, rumah toko dan apartemen dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata. Biaya perolehan rumah tinggal dan rumah tinggal dalam penyelesaian meliputi seluruh biaya konstruksi bangunan, diluar biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembelian tanah mentah, pematangan dan pengembangan tanah, perijinan dan jasa konsultasi. Biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai perolehan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset real estat selama masa konstruksi.

Biaya yang tidak terhubung secara langsung dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasi ke setiap unit real estat dengan menggunakan metode identifikasi khusus yang diterapkan secara konsisten.

Biaya pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada proyek pengembangan tersebut apabila secara substantial telah siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya atau aktivitas pembangunan ditunda atau ditangguhkan dalam suatu periode yang cukup lama.

### 2.k. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan serta sarana dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran umur manfaat aset Properti Investasi.

	ranun
Bangunan	20-50
Sarana dan Prasarana	5-30

- .

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

#### 2.I. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan estimasi kerugian penurunan nilai. Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun
Kepemilikan Langsung	,
Bangunan	20 - 50
Sarana dan Prasarana	5 - 30
Mesin dan Peralatan	5 - 40
Perabotan dan Perlengkapan Kantor	5
Alat Transportasi (Kendaraan)	5
Kapal	8
Binatang	5-25

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset Hak-Guna 5-21

Pada tahun 2018, Grup menelaah estimasi masa manfaat ekonomis untuk bangunan, sarana dan prasarana, dan mesin dan perlengkapan yang umurnya dapat diestimasi secara andal, yakni berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh Grup.

Penelaahan atas estimasi masa manfaat ekonomis Grup dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Asrori & Rekan, Penilai Publik Independen, yang telah terdaftar di Kementrian Keuangan No. 2.15.00126 dengan laporannya No. 00251/FR-AS/TIJA/Studi/IX/2018.

Perubahan ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 208 (Revisi 2024).

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir tahun pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan berdasarkan kondisi teknis dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

### 2.m. Aset Lain-lain

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset takberwujud disajikan dalam aset lain-lain.

#### 2.n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

### Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

	Tahun
Perangkat Lunak Komputer	5
Lisensi	1-5
Hak Atas Tanah	20

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

#### Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan kedaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

#### 2.o. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

#### 2.p. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

#### 1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

### 2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai *venturer* bersama.

*Venturer* bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### 2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

- 1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
  - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
  - Kontrak memiliki substansi komersial;
  - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
- 2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
- 3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
- 4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
- 5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui jumlah pendapatan yang dapat diakui pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan asset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

#### Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

#### 2.r. Imbalan Kerja

### Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

#### Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

#### 2.s. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal goodwill; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir tahun pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir tahun pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
  - i. entitas kena paiak vang sama: atau
  - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

#### 2.t. Sewa

### Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- (a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- (b) Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- (c) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan aset digunakan telah ditentukan mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
  - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalty penghentikan jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hakguna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan asset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur liablitas sewa dengan:

- (a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- (b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- (c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revision.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

#### Grup Sebagai Lessor

Grup mengakui asset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodic yang konstan atas investasi neto Grup sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset sebagai sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat asset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari asset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

#### Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut (lihat Catatan 15 untuk nilai tercatat Properti Investasi dan Catatan 16 untuk nilai tercatat aset tetap).

#### Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja. Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

#### Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menilai penurunan nilai pada asset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 3, 4, dan 5.

#### Pajak Penghasilan

Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan (Catatan 8).

### Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

#### 2.v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu tahun.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 1.599.999.998 untuk tahun 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021.

#### 2.w. Informasi Segmen

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas di dalam Grup.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

### 3. Kas dan Setara Kas

Jumlah Bersih

	30 September 2024	31 Desember 2023
Kas	915	935
Bank		
Rupiah		
Pihak Berelasi (Catatan 39)	13.124	10.143
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.886	17.982
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.959	10.839
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.631	766
PT Bank Central Asia Tbk	4.116	3.537
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	209	209
PT Bank Permata Tbk	20	1.135
USD		
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.120	
<b>5</b>	53.065	44.611
Danasita Parianaka		44.011
Deposito Berjangka		
Rupiah	445.025	255 000
Pihak Berelasi (Catatan 39)	115.035	355.000
Pihak Ketiga	400.000	
PT Bank Mandiri Taspen	100.000	<b></b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<del></del>	9.900
PT Bank Permata Tbk		1.000
	215.035	365.900
Jumlah Kas dan Setara Kas	269.015	411.446
Tingkat Suku Bunga Kontraktual		
Deposito Berjangka Per Tahun (%)	2,25% - 7,00%	2,25% - 6,55%
Jangka Waktu	1 bulan - 3 Bulan	1 bulan - 3 Bulan
	. Janan C Janan	
Piutang Usaha		
	30 September 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 39)	2.712	9.531
	125.627	113.789
Pihak Ketiga		110.703
Pihak Ketiga Dikurangi:		
Pihak Ketiga Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(76.878)	(61.083)

62.237

51.461

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Belum Jatuh Tempo	18.509	12.581
Sudah Jatuh Tempo		
1 - 30 hari	5.234	15.372
31 - 60 hari	2.960	3.579
61 - 90 hari	7.921	3.189
> 90 hari	93.714	88.599
Jumlah	128.339	123.320
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(76.878)	(61.083)
Jumlah Bersih	51.461	62.237

Manajemen telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara kelompok atas masing-masing debitur.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	61.083	47.853
Penambahan (Catatan 35)	16.105	25.050
Pemulihan (Catatan 34)	(310)	(11.820)
Saldo Akhir	76.878	61.083

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai diatas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

### 5. Piutang Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Nihil dan Rp17.781, piutang lain-lain pihak berelasi merupakan piutang pembagian dividen PT Jakarta Akses Tol Priok (Catatan 12).

Saldo piutang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.987 dan Rp8.296.

Piutang lain-lain pihak ketiga merupakan piutang sponsor dan *tenant* yang belum ditagihkan dan akrual pendapatan bunga.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga manajemen tidak mencadangkan penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang lain-lain.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### 6. Persediaan

	30 September 2024	31 Desember 2023
Suku Cadang	3.642	3.762
Makanan dan Minuman	1.246	1.249
Barang Dagangan	1.838	1.026
House Keeping	841	399
Minyak Pelumas	58	61
Sub Jumlah	7.625	6.497
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	(440)	(440)
Jumlah	7.185	6.057

Persediaan Grup terdiri dari persediaan dengan tingkat perputaran cepat (*fast moving*), antara lain persediaan makanan dan minuman, barang dagangan, *House Keeping* serta minyak pelumas.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai persediaan.

### 7. Uang Muka

Saldo uang muka pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp18.471 dan Rp1.777.

Uang muka terdiri dari uang muka operasional atas pelaksanaan proyek dan kegiatan usaha atau acara-acara yang diselenggarakan.

### 8. Perpajakan

### a. Pajak Dibayar di Muka

30 September 2024	31 Desember 2023
1.192	
5.427	1.290
3.217	3.227
<del></del>	1
16.551	
26.387	4.518
	1.192 5.427 3.217  16.551

### b. Utang Pajak

	30 September 2024	31 Desember 2023	
Perusahaan			
Pajak Pertambahan Nilai	<del></del>	654	
Pajak Penghasilan			
Pasal 4 (2)	739	3.202	
Pasal 21	1.258	9.223	
Pasal 23	110	181	
Sub Jumlah	2.107	13.260	

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September 2024	31 Desember 2023
Entitas Anak		
Pajak Hiburan	7.196	12.478
Pajak Pertambahan Nilai	4.560	5.165
Pajak Pembangunan	969	1.402
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	4.555	7.718
Pasal 21	249	4.395
Pasal 23	162	457
Pasal 25	8.780	96.830
Sub Jumlah	26.471	128.445
Jumlah	28.578	141.705

### c. Pajak Kini

	30 September		
	2024	2023	
Perusahaan			
Pajak Kini	<del></del>		
Pajak Tangguhan			
Jumlah	<u></u>		
Entitas Anak			
Pajak Kini	(39.399)	(73.349)	
Pajak Tangguhan	(4.080)	(8.564)	
Jumlah	(43.479)	(81.913)	
Konsolidasian			
Pajak Kini	(39.399)	(73.349)	
Pajak Tangguhan	(4.080)	(8.564)	
Jumlah	(43.479)	(81.913)	

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	30 September	
	2024	2023
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak,	143.414	251.557
Asosiasi dan Ventura Bersama	(1.277)	(300.666)
Eliminasi dan Penyesuaian	(224.932)	(84.252)
Rugi Sebelum Pajak Entitas Induk	(82.795)	(133.361)
Bagian Laba (Rugi) dan Beban yang telah		
Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	10.270	38.271
Rugi Sebelum Pajak	(72.525)	(95.090)
Koreksi Fiskal		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(10.910)	(8.913)
Manfaat Karyawan	3.831	6.745

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September	
	2024	2023
Bonus dan Tantiem	441	(3.999)
Jamuan Tamu dan Sumbangan	4.024	4.189
Penghargaan Karyawan	1.130	243
Penghasilan Bunga	(4.680)	(5.620)
Lain-lain	71.811	74.675
Jumlah Koreksi Fiskal	65.646	67.320
Rugi Fiskal	(6.878)	(27.770)
Pajak Kini		
Perusahaan	<del></del>	
Entitas Anak	(39.399)	(73.349)
Jumlah Beban Pajak Kini	(39.399)	(73.349)
Dikurangi: Pajak Dibayar di Muka		
Entitas Anak		
PPh Pasal 22	41	48
PPh Pasal 23	370	177
PPh Pasal 25	55.537	4.762
Jumlah	55.949	4.987
Jumlah Bersih Lebih (Kurang) Bayar	16.550	(68.362)
Terdiri dari:		
Perusahaan	<del></del>	
Entitas Anak	16.550	(68.362)
Jumlah Bersih	16.550	(68.362)

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	30 September	
	2024	2023
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi		
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	143.414	251.557
Eliminasi dan Penyesuaian	(224.932)	(84.252)
Bagian Laba (Rugi) dan Beban yang telah		
Dikenakan Pajak yang Bersifat Final	10.270	38.271
Rugi Sebelum Pajak Perusahaan	(71.248)	205.576
Tarif Pajak 22%	(15.675)	45.227
Koreksi Fiskal	14.161	(51.336)
Rugi Fiskal Tidak Dimanfaatkan	1.513	6.109
Beban Pajak Kini Perusahaan		

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

### d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2023	Dibebankan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif Lain	30 Sep 2024
<b>Aset Pajak Tangguhan</b> PT SI	579			579
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	579			579
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b> PT TIJA PT STU	(143.736) (2.127)	(4.080)		(147.816) (2.127)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(145.863)	(4.080)		(149.943)
	31 Des 2022	Dibebankan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Des 2023
<b>Aset Pajak Tangguhan</b> PT SI	568	(230)	241	579
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	568	(230)	241	579
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b> PT TIJA PT STU	(137.827) (2.694)	(10.257) 567	4.348	(143.736) (2.127)
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	(140.521)	(9.690)	4.348	(145.863)

Berdasarkan penilaian yang dibuat oleh manajemen, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pajak dan komersial karena sebagian besar penghasilan Perusahaan telah dikenakan pajak final sehingga dampak pajak tangguhannya dipertimbangkan tidak material.

#### 9. Pajak Final

Jumlah beban pajak final untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.028 dan Rp11.499 yang dihitung dari pendapatan yang dikenakan pajak final masing-masing sebesar Rp194.533 dan Rp118.096.

### 10. Biaya Dibayar di Muka

30 September 2024	31 Desember 2023
2.210	4.580
15.336	16
17.546	4.596
	2.210 15.336

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### 11. Investasi pada Ventura Bersama

	30 September 2024						
	Domisili	Persentase Kepemilikan %	Saldo Awal Rp	Pengembalian Investasi Rp	Bagian Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan Rp	Saldo Akhir Rp	
KSO Pembangunan Jaya Property KSO Ancol Batavia	Jakarta Jakarta	65,00 50,00	3.795 2.020	-	- (326) 	3.468 2.020	
Jumlah	ounaria		5.815		- (326)	5.488	
	31 Desember 2023						
	Domisili	Persentase Kepemilikan	Saldo Awal	Pengembalian Investasi	Bagian Laba (Rugi) Neto Periode	Saldo Akhir	
			Rp	Rp	Berjalan Rp	Rp	
KSO Pembangunan Jaya Property	Jakarta	65,00	4.569	-	- (774)	3.795	
KSO Ancol Batavia	Jakarta	50,00	2.009		- 11	2.020	
Jumlah			6.578		<u> </u>	5.815	

#### KSO Pembangunan Jaya Property

Tanggal 21 Desember 2011 Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pembangunan apartemen *double decker* dan kondominium di kawasan Ancol Barat beserta sarana dan prasarananya, dengan komposisi bagi hasil Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk masing-masing sebesar 65% dan 35%.

Berdasarkan addendum II Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 15 Desember 2014 para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama pada proyek kondominium di atas tanah seluas 12.162 m², atas addendum ini proyek yang dijalankan hanya pembangunan apartemen *Double Decker* seluas 2.650 m².

Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Pembagian Keuntungan dan Pengembalian Sebagian Investasi KSO Pembangunan Jaya Property tanggal 20 April 2020, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menerima sebesar Rp5.216 atas pembagian keuntungan sebesar 65% dari nilai laba bersih sampai dengan tahun 2019, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berhak menerima sebesar 65% dari total pengembalian sebagian investasi senilai Rp7.800.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Jaya Real Property Tbk No. PJA: 001/DIR-PJA/VII/2020 No.JRP: 004/BAK/ JRP-PJA/VII/2020 tentang pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Dalam Rangka Pembangunan Hunian dan Komersial di Kawasan Ancol Barat Beserta Dengan Sarana dan Prasarananya memutuskan bahwa Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengakiri Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam Akta Notaris pengakhiran perjanjian yang ditunjuk dan/atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan terbit, belum terdapat pengakhiran perjanjian tersebut.

### KSO Ancol Batavia

Pada tanggal 20 April 2022 PT JA dan PT Batavia Pictures mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pembuatan dan pengembangan *Intellectual Property* (IP) dengan porsi kontribusi berupa penyertaan modal ke dalam KSO dengan komposisi PT JA dan PT Batavia Pictures masing-masing sebesar 50%.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

### 12. Investasi pada Entitas Asosiasi

Perusahaan memiliki penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
PT Fauna Land Ancol (PT FLA)	14.943	15.420
PT Philindo Sporting Amusement		
and Tourism Corporation (PT PSATC)	7.558	5.955
PT Jaya Kuliner Lestari (PT JKL)	2.054	2.195
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta (PT KEKMJ)	1.079	1.078
PT Jakarta Akses Tol Priok (PT JATP)	602	4.948
Jumlah	26.236	29.596

Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	30 September 2024						
	Domisili	Persentase Kepemilikan	Nilai Tercatat	Penambahan (Pelepasan)	Penerimaan Dividen	Bagian Laba (Rugi) Neto	Saldo Akhir
		%	Awal Tahun Rp	Investasi Rp	Rp	Tahun Berjalan Rp	Rp
PT Fauna Land Ancol (FLA) PT Philindo Sporting Amusement	Jakarta	35,00	15.420			(477)	14.943
and Tourism Corporation (PSATC) PT Jakarta Akses Tol	Jakarta	50,00	5.955			1.603	7.558
Priok (JATP)	Jakarta	50,00	4.948		(4.091)	(250)	602
PT Jaya Kuliner Lestari (JKL) PT Kawasan Ekonomi Khusus	Jakarta	25,00	2.195			(142)	2.054
Marunda Jakarta (KEKMJ)	Jakarta	25,00	1.078				1.079
Jumlah			8.221		(4.091)	734	26.236

	31 Desember 2023						
	Domisili	Persentase Kepemilikan	Nilai Tercatat	Penambahan (Pelepasan)	Penerimaan Dividen	Bagian Laba (Rugi) Neto	Saldo Akhir
		%	Awal Tahun Rp	Investasi Rp	Rp	Tahun Berjalan Rp	Rp
PT Fauna Land Ancol (FLA) PT Philindo Sporting Amusement	Jakarta	35,00	16.212		-	(792)	15.420
and Tourism Corporation (PSATC) PT Jakarta Akses Tol	Jakarta	50,00				5.955	5.955
Priok (JATP)	Jakarta	50,00	6.429		(19.781)	18.300	4.948
PT Jaya Kuliner Lestari (JKL) PT Kawasan Ekonomi Khusus	Jakarta	25,00	2.660		(1.000)	535	2.195
Marunda Jakarta (KEKMJ)	Jakarta	25,00	1.060			18	1.078
Jumlah			26.361		(20.781)	24.016	29.596

#### PT PSATC

Pada 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 Perusahaan mendapatkan porsi laba masing-masing sebesar Rp1.603 dan Rp6.107, dan melakukan absorb laba bersih masing-masing sebesar Rp1.603 dan Rp5.955.

## PT JATP

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 17 Februari 2023 dari Notaris Pratiwi Handayani S.H., dan Surat keputusan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pembagian Dividen Interim tahun 2023 No. 02/JAPT/Kpts/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, Komisaris, Direksi, dan pemegang saham PT JATP menyetujui pembagian dividen sebesar Rp19.781 kepada PT JAPT.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

#### PT JKL

Pada tahun 2023, PT JKL melakukan pembagian dividen sebesar Rp1.000 kepada PT TI.

Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi.

Berikut adalah informasi keuangan entitas asosiasi per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Jumlah Agregat Aset	83.816	125.544
Jumlah Agregat Liabilitas	4.530	46.557
Jumlah Agregat Pendapatan	6.871	48.126
Jumlah Agregat Laba Komprehensif	864	48.766

### 13. Investasi Jangka Panjang Lainnya

		30 September 2024			
Tempat Kedudukan	%	Saldo Awal	Perubahan Nilai Wajar	Saldo Akhir	
Jakarta	5,89%	128.298		128.298	
Jakarta	16,75%	638		638	
		128.936	<u></u>	128.936	
			31 Desember 2023		
Tempat Kedudukan	%	Saldo Awal	Perubahan Nilai Wajar	Saldo Akhir	
Jakarta	5,89%	183.487	(55.189)	128.298	
Jakarta	16,75%	638		638	
		184.125	(55.189)	128.936	
	Jakarta Jakarta Tempat Kedudukan Jakarta	Kedudukan%Jakarta5,89%Jakarta16,75%  Tempat%Kedudukan%	Kedudukan         %         Saldo Awal           Jakarta         5,89%         128.298           Jakarta         16,75%         638           128.936         128.936           Tempat Kedudukan         %         Saldo Awal           Jakarta         5,89%         183.487           Jakarta         16,75%         638	Tempat Kedudukan         %         Saldo Awal         Perubahan Nilai Wajar           Jakarta         5,89%         128.298            Jakarta         16,75%         638            128.936             Tempat Kedudukan         %         Saldo Awal         Perubahan Nilai Wajar           Jakarta         5,89%         183.487         (55.189)           Jakarta         16,75%         638	

### PT JTD

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perusahaan melakukan reklasifikasi investasi pada JTD yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pengakuan awal investasi diukur pada nilai wajar sebesar Rp265.669 berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya No. 00047/2.0126-00/BS/05/0338/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui di laba rugi.

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 28 Desember 2022 dari Notaris Aulia Taufani S.H., mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan peningkatan modal dasar melalui penerbitan 294.026 lembar saham seri B dengan nilai Rp1.000.000. Perusahaan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham sehingga kepemilikan investasi Perusahaan di PT JTD menjadi sebesar 6,66%.

Nilai wajar investasi saham PT JTD pada tanggal 30 November 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp133.575 dan Rp183.487 didasarkan pada perhitungan penilai publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan serta Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya tanggal 26 Januari 2024 dan 24 Maret 2023. Perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp55.189 dan Rp82.182 diakui pada penghasilan komprehensif lain.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Aulia Taufani S.H., mengenai pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi 751.035 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 (Rupiah Penuh). Perusahaan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham sehingga kepemilikan investasi Perusahaan di PT JTD menjadi sebesar 5.89%.

Berdasarkan perubahan kepemilikan Perusahaan di PT JTD tersebut, maka manajemen melakukan penyesuaian atas nilai wajar sebesar Rp5.277 yang diakui pada penghasilan komprehensif lain. Nilai wajar investasi saham atas kepemilikan 5,89% Perusahaan di JTD pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp128.298.

Pengukuran nilai wajar menggunakan pendekatan aset dengan metode penyesuaian nilai buku aset. (Tingkat 3).

#### 14. Aset Real Estat

30 September 2024	31 Desember 2023
202.654	204.568
73.582	75.475
276.236	280.043
	202.654 73.582

#### a. Mutasi tanah:

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Penjualan	Saldo Akhir
30 September 2024	204.568		(1.914)	202.654
31 Desember 2023	204.021	547		204.568

Lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah adalah sebagai berikut:

	30 Septem	ber 2024	31 Desember 2023		
Lokasi	Luas Tanah	Nilai Perolehan	Luas Tanah	Nilai Perolehan	
	m²	m² Rp		Rp	
Ancol Timur	282.468	162.583	282.628	164.497	
Ancol Barat	5.436	20.548	5.436	20.548	
Marunda	26.957	18.447	26.957	18.447	
Tugu Permai	3.855	929	3.855	929	
Sunter	1.585	147	1.585	147	
Jumlah	320.301	202.654	320.461	204.568	

Tanah Perusahaan di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara dengan HGB No. 649 luas sebesar 1.585 m² dan nilai perolehan sebesar Rp147 masing-masing pada 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, tercatat atas nama PT Regional Engineering dan Alumunium Manufacturing & Co.

## b. Mutasi rumah dan apartemen:

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Penjualan	Saldo Akhir
30 September 2024	75.475		(1.893)	73.582
31 Desember 2023	75.351	124		75.475

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Lokasi, jumlah dan nilai perolehan atas rumah dan apartemen adalah sebagai berikut:

	30 Septem	ber 2024	31 Desember 2023		
Lokasi	Jumlah Unit	Nilai Perolehan Rp	Jumlah Unit	Nilai Perolehan Rp	
Ancol Timur	20	59.888	22	61.781	
Pademangan	21	12.335	21	12.335	
Ancol Barat	6	1.359	6	1.359	
Jumlah	47	73.582	49	75.475	

Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 Perusahaan telah mengasuransikan aset real estat kepada pihak ketiga yang tergabung dalam suatu polis asuransi gabungan bersama aset tetap (Catatan 16).

## 15. Properti Investasi

	2024				
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	30 September
Biaya Perolehan:					
Tanah	4.523				4.523
Bangunan	280.028				280.028
Sarana dan Prasarana	25.318				25.318
Jumlah	309.869				309.869
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan	84.052	4.970			89.022
Sarana dan Prasarana	19.543	551			20.094
Jumlah	103.595	5.521			109.116
Nilai Tercatat	206.274				200.753
-					
_			2023		
-	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember
					31 Desember
Biaya Perolehan:					31 Desember
Biaya Perolehan: Tanah	4.523				4.523
Tanah Bangunan	4.523 280.028	 			4.523 280.028
Tanah		  	  	  	4.523
Tanah Bangunan	280.028	   	   	   	4.523 280.028
Tanah Bangunan Sarana dan Prasarana	280.028 25.318	   	   	   	4.523 280.028 25.318
Tanah Bangunan Sarana dan Prasarana Jumlah	280.028 25.318	    6.628	   	   	4.523 280.028 25.318
Tanah Bangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Akumulasi Penyusutan:	280.028 25.318 309.869	    6.628 736	   	    	4.523 280.028 25.318 309.869
Tanah Bangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Akumulasi Penyusutan: Bangunan	280.028 25.318 309.869 77.424		     	     	4.523 280.028 25.318 309.869 84.052
Tanah Bangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Akumulasi Penyusutan: Bangunan Sarana dan Prasarana	280.028 25.318 309.869 77.424 18.807	736		     	4.523 280.028 25.318 309.869 84.052 19.543

Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mengasuransikan properti investasi kepada pihak ketiga yang tergabung dalam suatu polis asuransi gabungan bersama aset tetap (Catatan 16).

Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 tidak terdapat properti investasi milik Perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada pihak ketiga.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan sewa yang diterima Perusahaan dari properti investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.658 dan Rp1.157 (Catatan 32).

Beban penyusutan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 dicatat sebagai bagian dari beban langsung masing-masing sebesar Rp5.521 dan Rp7.364 (Catatan 33).

Beban operasi yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan properti investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 sebesar Rp50 dan Rp75 (Catatan 32).

## 16. Aset Tetap

	2024						
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	30 September		
Biaya Perolehan:							
Tanah	15.297				15.297		
Bangunan	1.166.997			41.588	1.208.585		
Sarana dan Prasarana	1.173.341			18.221	1.191.562		
Mesin dan Perlengkapan	1.191.779			41.232	1.233.011		
Peralatan	67.839			866	68.705		
Kendaraan	4.846			1.578	6.424		
Kapal	5.110				5.110		
Binatang	12.438			1.149	13.587		
Sub Jumlah	3.637.647			104.634	3.742.281		
Aset Dalam Pembangunan	768.907	122.780		(104.634)	787.053		
Jumlah Biaya Perolehan	4.406.554	122.780			4.529.334		
Akumulasi Penyusutan:							
Bangunan	455.981	23.344			479.325		
Sarana dan Prasarana	628.198	18.888			647.086		
Mesin dan Perlengkapan	662.956	34.812			697.768		
Peralatan	63.969	1.328			65.297		
Kendaraan	4.580	198			4.778		
Kapal	4.743	89			4.832		
Binatang	7.329	872			8.201		
Jumlah	1.827.756	79.531			1.907.287		
Beban Penurunan:							
Nilai Aset Tetap	322				322		
Nilai Aset dalam Pembangunan	122.674			-	122.674		
Nilai Tercatat	2.455.802				2.499.051		

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2023

			2020		
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember
Biaya Perolehan		_		_	_
Tanah	15.297				15.297
Bangunan	1.141.600		(1.619)	27.016	1.166.997
Sarana dan Prasarana	1.156.676		(1.810)	18.475	1.173.341
Mesin dan Perlengkapan	1.151.645		(67)	40.201	1.191.779
Peralatan	66.922		(9)	926	67.839
Kendaraan	4.654			192	4.846
Kapal	5.110				5.110
Binatang	12.239			199	12.438
Sub Jumlah	3.554.143		(3.505)	87.009	3.637.647
Aset Dalam Pembangunan	747.438	108.478		(87.009)	768.907
Jumlah	4.301.581	108.478	(3.505)		4.406.554
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	427.705	29.895	(1.619)		455.981
Sarana dan Prasarana	605.068	24.940	(1.810)		628.198
Mesin dan Perlengkapan	623.175	39.848	(67)		662.956
Peralatan	62.181	1.797	(9)		63.969
Kendaraan	4.433	147			4.580
Kapal	4.614	129			4.743
Binatang	6.356	973			7.329
Jumlah	1.733.532	97.729	(3.505)		1.827.756
Beban Penurunan Nilai					
Aset Tetap	322				322
Aset dalam Pembangunan	58.289	64.385		<u></u>	122.674
Nilai Tercatat	2.509.439				2.455.802
				· ·	

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	30 September		
	2024	2023	
Beban Langsung (Catatan 32)	75.472	63.639	
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 33)	4.059	4.473	
Jumlah	79.531	68.112	

Perusahaan memiliki tanah yang terletak di Jakarta Utara, dengan hak legal berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemda DKI, seluas 4.779.120 m2, juga memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jakarta Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir di tahun 2027. Untuk HPL, selama tanah tersebut dipergunakan untuk industri, perumahan dan rekreasi, Perusahaan akan tetap mempunyai hak untuk mengelolanya.

Penambahan aset tetap untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 berasal dari Inovasi Cottage Putri Duyung Ancol, Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera, dan Area Taman Impian. Penambahan aset tetap pada tahun 2023 berasal dari Penggantian Sistem ERP SAP dan HCMS, Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera, Atlantis Water Adventure, Seaword Ancol dan Area Taman Impian.

Aset dalam penyelesaian per 30 September 2024 sebesar Rp787.053 dengan kenaikan bersih sebesar Rp18.146 pada tahun berjalan sebagian besar atas Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera dan Area Taman Impian.

Aset dalam penyelesaian untuk proyek perluasan kawasan pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp530.611 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp521.923. Pada tanggal 24 Februari 2020, Gubernur DKI

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jakarta secara resmi mengumumkan izin perluasan pengembangan kawasan seluas 155 hektare. Izin tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas ± 35 Hektare Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Hektar (Catatan 41.c).

Penambahan aset tetap yang berasal dari penambahan utang lain-lain pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.136 dan Rp6.278 (Catatan 45).

Nilai wajar aset dalam penyelesaian untuk proyek perluasan kawasan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.187.469 didasarkan pada perhitungan penilai publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya No. 00046/2.0126-00/PI/05/0338/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 seluruh properti investasi dan aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Sunday Insurance Indonesia, PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT. Asuransi FPG Indonesia dan PT. Avrist General Insurance pihak ketiga, terhadap risiko gempa bumi, kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.035.723.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

## 17. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

		202	24	
_	1 Januari	Penambahan	Modifikasi Sewa	30 September
Biaya Perolehan				
Tanah	106.118		(9.378)	96.740
Bangunan	3.027			3.027
Jumlah	109.145	<u></u>	(9.378)	99.767
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	27.912	5.162		33.074
Bangunan	2.270	454		2.724
Jumlah	30.182	5.616		35.798
Nilai Tercatat	78.963		=	63.969
_		202	23	
<u>_</u>	1 Januari	Penambahan	Modifikasi Sewa	31 Desember
Biaya Perolehan				
Tanah	106.118			106.118
Bangunan		3.027		3.027
Jumlah	106.118	3.027		109.145
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	20.802	7.110		27.912
Bangunan		2.270		2.270
Jumlah	20.802	9.380		30.182
Nilai Tercatat	85.316		_	78.963

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 22 Agustus 2023, berdasarkan Akta No. 45 tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perusahaan tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang berlokasi di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan nilai sebesar Rp3.500 dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 5 April 2020 dan berakhir pada tanggal 4 April 2025.

Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan pada Beban Langsung (Catatan 32) pada 30 September 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp5.616 dan Rp7.500.

Berikut ini ringkasan komponen liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Liabilitas Sewa		
Jatuh tempo dalam satu tahun	3.031	10.451
Jatuh tempo dalam lebih dari satu tahun	120.241	141.974
Jumlah	123.272	152.425
Dikurangi bagian bunga	(36.063)	(52.220)
Nilai kini Pembayaran Sewa	87.209	100.205
Dikurangi: bagian jatuh tempo satu tahun	(4.785)	(3.126)
Bagian Jangka Panjang	82.424	97.079

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	100.205	101.654
Arus Kas	(8.570)	(12.376)
Penambahan		3.027
Perubahan Nonkas		
Penambahan Bunga	4.952	7.900
Modifikasi Sewa	(9.378)	
Saldo Akhir	87.209	100.205

## 18. Aset Takberwujud

			2024		
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	30 September
Biaya Perolehan					
Hak Atas Tanah	13.067				13.067
Lisensi dan Royalti	41.903	2.055			43.958
Perangkat Lunak Komputer	15.314	1.002			16.316
Hak Kekayaan Intelektual	3.621	464			4.085
Penelitian dan Pengembangan	5.924	1.961			7.885
Jumlah	79.829	5.482			85.311
Akumulasi					
Penyusutan					
Hak Atas Tanah	7.159	40			7.199
Lisensi dan Royalti	35.018	4.602			39.620
Perangkat Lunak Komputer	13.027	577			13.604
Hak Kekayaan Intelektual	203	286			489
Penelitian dan Pengembangan	2.912	779			3.691
Jumlah	58.319	6.284			64.603
Nilai Tercatat	21.510				20.708

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023				
	1 Januari	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember
Biaya Perolehan:					
Hak Atas Tanah	13.067				13.067
Lisensi dan Royalti	25.987	15.916			41.903
Perangkat Lunak Komputer	12.925	2.389			15.314
Hak Kekayaan Intelektual		3.621			3.621
Penelitian dan Pengembangan	3.225	2.699			5.924
Jumlah	55.204	24.625			79.829
Akumulasi					
Penyusutan					
Hak Atas Tanah	5.779	1.380			7.159
Lisensi dan Royalti	27.376	7.642			35.018
Perangkat Lunak Komputer	11.886	1.141			13.027
Hak Kekayaan Intelektual		203			203
Penelitian dan Pengembangan	2.279	633			2.912
Jumlah	47.320	10.999			58.319
Nilai Tercatat	7.884				21.510

2022

Beban amortisasi dialokasi sebagai berikut:

	30 September		
	2024	2023	
Beban Langsung (Catatan 32)	974	2.540	
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 33)	1.190	256	
Jumlah	2.164	2.796	

Pada tahun 1994, PT SBI memperoleh Hak Pengelolaan atas pulau Bidadari di Kepulauan Seribu seluas 38.220 m² dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI) Jakarta, sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 3280/1.711.5 tanggal 12 Oktober 1994, dengan jangka waktu 20 tahun. Pada tahun 2003, telah terjadi peningkatan status SIPPT tersebut menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam HGB No. 255 tanggal 31 Juli 2003 dan Hak Pakai No. 19tanggal 25 September 2003. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur Hak Guna Bangunan/HGB. Sampai dengan laporan ini diterbitkan Grup masih dalam proses pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan ini.

Lisensi dan Royalti merupakan lisensi atas musik dan wahana yang terdapat pada Kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Perangkat lunak komputer merupakan biaya atas pembelian piranti lunak yang bersifat spesifik berdasarkan proses bisnis Grup.

Penambahan aset takberwujud untuk tahun 2023 berasal dari lisensi *ice age*, penyusunan *feasibility study cable car*, sistem *enterprise resource planning (ERP*), dan penyusunan dokumen rencana jangka panjang Perusahan.

Penambahan aset takberwujud untuk tahun 2024 berasal dari lisensi *Music Ancol*, Riset dan Pengembangan Tol Ancol Harbour, Riset dan Pengembangan Hotel Ancol.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023, Grup mencatat beban amortisasi masing-masing sebesar Rp2.164 dan Rp2.501 yang dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban langsung serta beban umum dan administrasi.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 19. Aset Lain-lain

### a. Aset Lain-lain Lancar

	30 September 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain Lancar	·	
Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi (Catatan 39)	2.500	2.500
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	73	73
Jumlah	2.573	2.573

## b. Aset Lain-lain Tidak Lancar

	30 September 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain Tidak Lancar		
Dana Dibatasi penggunaannya		
Pihak Berelasi (Catatan 39)	1.406	7.332
Pihak Ketiga		
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk	349	349
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	243	243
Sub Jumlah	1.998	7.924
Lain-lain	5.082	5.161
Jumlah	7.080	13.085

Deposito berjangka pada PT Bank DKI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki tingkat suku bunga per tahun sebesar 5,25% untuk PT Bank DKI, dan 3,25% untuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tipe dari deposito ini adalah *Automatic Roll Over* (ARO) dengan jangka waktu 1 tahun.

## 20. Utang Usaha

	30 September 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 39)	840	840
Pihak Ketiga		
PT Bumi Daya Plaza	1.314	3.599
PT Media Prima Solutions	1.059	1.059
PT Senior Selalu Paham	911	
PT ISS Indonesia	759	
PT Global Integrasi Telematika	576	576
PT Sukses Sata Mandiri	504	
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp500 Juta)	7.509	6.093
Sub Jumlah	12.631	11.327
Jumlah	13.471	12.167

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Belum Jatuh Tempo	4.908	5.371
Sudah Jatuh Tempo		
1-30 hari	54	74
31-60 hari	355	671
61-90 hari	3.442	1.106
>90 hari	4.712	4.945
Jumlah	13.471	12.167

## 21. Utang Lain-lain

	30 September 2024	31 Desember 2023
Pihak Ketiga		
PT Emtu Karya Sentosa	1.186	1.328
PT Anugrah Bumi Kemiling	1.102	
PT Putra Anugerah Mandiri	988	979
PT Deka Buana Swastamas	985	941
CV Istana Timur Tehnik	906	1.731
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp800 Juta)	9.119	10.443
Sub Jumlah	14.286	15.422
Jumlah	14.286	15.422

## 22. Beban Akrual dan Provisi

	30 September 2024	31 Desember 2023
Operasional	28.514	44.211
Bonus dan Tantiem	20.240	43.318
Alih Daya	16.954	20.290
Bunga	12.397	3.265
Logistik	9.527	5.876
Gaji	7.520	10.775
Lisensi Wahana	2.312	2.312
Pemeliharaan	2.168	2.168
Iklan	1.402	1.402
Lain-lain	8.987	611
Jumlah Beban Akrual	110.021	134.228
Provisi	83.524	84.135
Jumlah	193.545	218.363

Beban akrual operasional adalah utang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sehubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan dan PT TIJA meliputi kegiatan penjualan, pemasaran, iklan, perbaikan, penyewaan, pemeliharaan dan beban utilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan membentuk provisi sehubungan dengan kewajiban Perusahaan atas pemenuhan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

### 23. Utang Bank

	30 September 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 39) Biaya Provisi	250.000 (6.212)	666.000 (7.885)
Jumlah Dikurangi:Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	243.788	658.115 (40.919)
Bagian Jangka Panjang	243.788	617.196

### PT Bank DKI

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.1489/SPPK/925/IX/2023 tanggal 19 September 2023, tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka (KMK PTB) dan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas Kredit Investasi *refinancing*, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit Rp389.000 dengan jangka waktu 24 bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau sampai dengan 20 September 2025. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 6,75% per tahun.

Perjanjian kredit ini dijaminkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tanah seluas 23.285 m2 yang terletak di Jl. R. E Martadinata kel. Ancol beserta bangunan Dunia Fantasi diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Banguan Dunia Fantasi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.2161/SPPK/910/IX/2021 tanggal 16 September 2021, terdapat perubahan tingkat bunga semula 7,15% per tahun menjadi 7% per tahun.

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 20 Desember 2021, tentang Perjanjian Kredit Investasi *Refinancing*, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan nilai Rp516.000 dengan jangka waktu 24 bulan untuk *grace period* dan 84 bulan untuk masa setelah *grace period* sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau total jangka waktu sampai dengan 14 Desember 2030. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar Jibor 3 bulan + margin 1,75% (selama *grace period*) dan Jibor 3 bulan + margin 3% (setelah *grace period*).

Perjanjian kredit ini dijaminkan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang terdaftar sebagai SHGB No 2943, seluas 23.285 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13-3-2007 No.01911/Ancol/2007 dengan No. Identifikasi Bidang (NIB) 0905070101905;
- 2. Izin mendirikan bangunan atas bangunan Dunia Fantasi Pengikatan Hak Tanggungan I sebesar Rp850.000.

Adapun affirmative covenants yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:

- 1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan kredit.
- 2. Menyampaikan laporan keuangan audited yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh PT Pembangunan Jaya ancol Tbk (Sesuai Akta Perseroan KAP ditunjuk oleh Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk) paling lambat 180 hari kalender setelah akhir periode laporan.
- 3. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap triwulan paling lambat 60 hari kalender setelah akhir laporan.
- 4. Menyampaikan laporan realisasi jumlah pengunjung bulanan, dan relaisasi pendapatan bulanan paling lambat 30 hari kalender setelah bulan berjalan.
- 5. Memelihara Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 2,5 kali.
- 6. Dalam rangka sinergi BUMD, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bersedia menjadikan Bank DKI sebagai Bank Utama Debitur termasuk dan tidak terbatas pada:
  - a. Bank penerima pembayaran yang berasal dari penerimaan tiket termasuk penjualan melalui *website* dan *e-commerce*.
  - b. Bank penerima pembayaran yang terkait dengan kegiatan usaha debitur yang tidak melalui Bank

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

DKI wajib dipindahbukukan maksimal H+2 ke Rekening debitur di Bank DKI.

- c. Menyerahkan rekening koran bulanan debitur pada bank lain paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- d. Memberikan akses inquiry untuk system payment gateway pada website ancol.
- e. Penempatan Dana Utama (Bank DKI minimal 90% dari total kas dan bank debitur)
- f. Penggunaan CMS.
- g. Pembayaran payroll karyawan.
- h. KMG Karyawan.
- i. Memprioritaskan Bank DKI sebagai mitra apabila menyelenggarakan program-program khusus kepada *customer.*
- j. Debitur bersedia melunasi pembayaran kewajiban kepada *vendor/supplier* sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
- 7. Memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinyadan berkewajiban untuk memperpanjang atau meperbaharui ijin-ijin dalam hal telah habis masa belakunya serta menyerahkan copy perpanjangan ke Bank DKI.
- 8. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank DKI, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal kejadian jika terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang saham, direksi, komisaris, permodalan dan nilai nominal saham.
- 9. Senantiasa selalu menjaga kualitas kredit atas nama Perusahaan dan Pengurus Perusahaan.

Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah (Negative Covenants):

Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank DKI, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal kejadian jika:

- 1. Membayar/melunasi utang pemegang saham.
- 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah atau belum dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
- 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dan/atau lembaga lain.

Pada tanggal 30 Agustus 2024 Perusahaan telah melunasi Kredit Investasi sebesar Rp503.631.

Saldo utang bank pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp243.788 dan Rp658.115.

### 24. Utang Obligasi

	30 September 2024	31 Desember 2023
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol		
Tahap II Tahun 2021	65.400	215.000
Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol		
Tahap I Tahun 2024	503.060	
Biaya Emisi Obligasi	(4.226)	(371)
Akumulasi Amortisasi	411	152
Jumlah	564.645	214.781
Dikurangi: Bagian Jatuh		
Tempo Dalam Satu Tahun		(149.568)
Bagian Jangka Panjang	564.645	65.213

#### Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024

Pada tanggal 9 Juli 2024, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 yaitu:

- a. Seri A senilai Rp446.030 dengan suku bunga 8,50% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 9 Juli 2027.
- b. Seri B senilai Rp20.010 dengan suku bunga 8,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 9 Juli 2029.
- c. Seri C senilai Rp37.020 dengan suku bunga 9,00% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 9 Juli 2031.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 9 Juli 2023, dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 adalah sebesar Rp503.060. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 mendapatkan peringkat idA+ (*Single A plus*) untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia adalah sangat kuat.

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2:1.
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 2:1.

## Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yaitu:

- d. Seri A senilai Rp516.000 dengan suku bunga 7,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022.
- e. Seri B senilai Rp149.600 dengan suku bunga 8,90% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 10 Februari 2024.
- f. Seri C senilai Rp65.400 dengan suku bunga 9,60% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 10 Februari 2026.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 10 Februari 2021, dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 adalah sebesar Rp731.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 mendapatkan peringkat idA (*Single A*) untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia adalah sangat kuat.

- c. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2:1.
- d. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 2:1.

Pada tanggal 8 Februari 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri A senilai Rp516.000 dan pada tanggal 10 Februari 2024, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp149.600.

## 25. Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan

	30 September 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Diterima di Muka		
Sewa	200.101	210.285
Proyek Ancol Beach City	127.951	135.051
Uang Muka <i>E-Commerce</i>	85.807	10.408
Uang Titipan	5.269	29.922
Uang Muka Rombongan	4.810	8.345
Sponsor	7.263	4.320
Lain-lain	3.482	5.462
Sub Jumlah	434.683	403.793

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September 2024	31 Desember 2023
Uang Muka Pelanggan Penjualan Tanah dan Bangunan	359	2.540
Jumlah	435.042	406.333
Dikurangi : Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(132.048)	(116.695)
Bagian Jangka Panjang	302.994	289.638

Pendapatan sewa diterima di muka terutama merupakan penyewaan lahan Perusahaan untuk pengembangan jaringan di pipa gas bumi milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN) (Catatan 41.d) dan jaringan di pipa gas bumi milik PT Pertamina Gas (PT Pertagas) (Catatan 41.d).

Pendapatan diterima di muka atas proyek Ancol Beach City berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengoperasian Bangunan *Music Stadium* No. 021/DIRPJA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan 31 Juli 2013, Perusahaan sepakat dan setuju untuk menyerahkan bangunan tersebut untuk dioperasikan oleh PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) selama 25 (dua puluh lima) tahun.

## 26. Jaminan Pelanggan dan Deposit Lainnya

	30 September 2024	31 Desember 2023
Jaminan Tiket	13.088	11.721
Jaminan Penyewa	6.825	1.676
Jumlah	19.913	13.397

Uang Jaminan yang diterima merupakan uang yang dibayarkan *tenant* kepada PT TIJA sebagai jaminan usaha di kawasan Ancol.

### 27. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup membukukan manfaat karyawan sesuai dengan peraturan Grup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan manfaat karyawan tersebut adalah masing-masing sebanyak 568 pada 30 September 2024 dan 31 Desember 2023. Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari liabilitas imbalan pascakerja sesuai undang-undang tenaga kerja dan liabilitas imbalan kerja lainnya berupa manfaat cuti besar dan penghargaan masa kerja.

## Program Imbalan Pasti

Pada 31 Desember 2022, Perusahaan dan PT TIJA telah menempatkan dana sebesar Rp13.291 pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AXA Mandiri untuk kompensasi pesangon pegawai.

### Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya terdiri dari:

- Imbalan Penghargaan Masa Kerja dalam bentuk cincin pengabdian terbuat dari 10 (sepuluh) gram emas. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus tanpa terputus sejak diangkat menjadi karyawan tetap;
- Imbalan Cuti Panjang berupa tunjangan cuti panjang sebesar 1 (satu) kali gaji bulanan diberikan kepada karyawan yang telah menjalani setiap kelipatan 5 (lima) tahun masa kerja.

Total liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	160.266	157.308
Nilai Wajar Aset Program	<del></del> _	(8.479)
Liabilitas Imbalan Kerja	160.266	148.829

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Liabilitas Imbalan Pasti Neto Awal Periode	148.829	98.114
Biaya yang diakui pada Laporan Laba/Rugi (Catatan 33)	17.687	20.820
Kontribusi Pemberi Kerja Periode Berjalan	(6.250)	(5.040)
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan	<del></del>	(2.060)
Pendapatan yang diakui pada		
Penghasilan Komprehensif Lain	<del></del>	36.995
Liabilitas Imbalan Pasti Neto Akhir Periode	160.266	148.829

Mutasi Kerugian Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Periode	92.699	38.988
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan		36.995
Akumulasi Pajak Penghasilan Terkait		16.716
Beban Komprehensif Lain Akhir Periode Setelah Pajak	92.699	92.699

Saldo liabilitas imbalan kerja dan imbalan lainnya pada 31 Desember 2023 didasarkan pada perhitungan aktuaria oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 19 Januari 2023 menggunakan asumsi sebagai berikut:

#### 30 September 2024 dan 31 Desember 2023

Tingkat Kematian	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia VI Tahun 2019
Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Cacat	10% per tahun
Kenaikan Gaji	6,7% per tahun
Tingkat Diskonto	7,25%-7,30% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 55 tahun

Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, dan risiko gaji.

## Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

### Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

#### Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir tahun pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

### 28. Modal Saham

	30 September 2024 dan 31 Desember 2023		
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemillikan	Jumlah Modal Disetor
Pemerintah DKI Jakarta			
Saham Seri A	1	0,0000001%	0,00050
Saham Seri C	1.151.999.998	71,9999999%	288.000
Jumlah	1.151.999.999	72,0000000%	288.000
PT Pembangunan Jaya			
Saham Seri B	1	0,0000001%	0,00050
Saham Seri C	288.099.998	18,0099999%	72.025
Jumlah	288.099.999	18,0100000%	72.025
Masyarakat			
(masing-masing dibawah 5%, Saham Seri C)	159.900.000	9,9900000%	39.975
Jumlah	1.599.999.998	100,0000000%	400.000

Perusahaan mengeluarkan saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan keterangan sebagai berikut:

- 1. Saham Seri A
  - Merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur dan 4 orang komisaris (termasuk 1 orang komisaris utama). Pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2. Saham Seri B
  - Merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada PT Pembangunan Jaya untuk mencalonkan direktur utama dan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur serta 1 orang komisaris. Pencalonan tersebut mengikat RUPS.
- 3. Saham Seri C
  - Saham Seri C memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham Seri A dan Seri B, kecuali hakhak istimewa yang dimiliki saham Seri A dan Seri B sebagaimana dijelaskan.

## 29. Tambahan Modal Disetor

30 September 2024	31 Desember 2023
42.000	42.000
(5.291)	(5.291)
3.695	3.695
40.404	40.404
	42.000 (5.291) 3.695

Pada tahun 2017 perusahaan telah melaporkan aset Pengampunan Pajak atas Perseroan sebesar Rp3.695 sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-643/PP/WPJ.07/2017 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 30. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan kepentingan nonpengendali atas aset bersih dan laba bersih Entitas Anak sebagai berikut:

	30 September 2024					
	Kepemilikan	Nilai Tercatat Awal Tahun	Bagian Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	Tambahan Setoran Modal pada Entitas Anak	Dampak Dilusi Saham	Nilai Tercatat Akhir Periode
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jaya Ancol Pratama Tol	40,00%	11.541	100			11.641
PT Sarana Tirta Utama	35,00%	9.078	(752)			8.326
PT Seabreez Indonesia	1,87%	461	(8)			453
Jumlah		21.080	(660)			20.420
			31 Desem	ber 2023		
	Kepemilikan	Nilai Tercatat Awal Tahun	Bagian Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	Tambahan Setoran Modal pada Entitas Anak	Dampak Dilusi Saham	Nilai Tercatat Akhir Tahun
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jaya Ancol Pratama Tol	40,00%	4.200	7.341			11.541
PT Sarana Tirta Utama	35,00%	10.317	(1.239)			9.078
PT Seabreez Indonesia	1,87%	446	15			461
Jumlah		14.963	6.117			21.080

## 31. Pendapatan Usaha

	30 September		
	2024	2023	
Pendapatan Real Estat			
Tanah dan Bangunan	5.676		
Pendapatan Tiket			
Pintu Gerbang	221.425	204.743	
Wahana Wisata	407.249	431.827	
Sub Jumlah	628.674	636.570	
Pendapatan Hotel dan Restoran			
Restoran	33.478	36.886	
Kamar	24.059	29.111	
Sub Jumlah	57.537	65.997	
Pendapatan Usaha Lainnya			
Penyewaan Kios, Lahan, dan Gedung	102.545	102.288	
Sponsor	21.353	18.725	
Pengelolaan Perumahan	20.004	27.234	
Barang Dagangan	19.537	17.650	
Uang Sandar dan luran	6.055	8.158	
Loker dan Permainan	5.438	6.675	
Logistik Acara	4.866	5.716	
Bagi Hasil	4.110	8.050	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar)	6.809	7.185	
Sub Jumlah	190.717	201.681	
Jumlah	882.604	904.248	
Dikurangi: Potongan Penjualan	(1.158)	(1.683)	
Bersih	881.446	902.565	

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 32. Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung

	30 September		
	2024	2023	
Beban Pokok Pendapatan			
Makanan dan Minuman	14.844	15.932	
Barang Dagangan	7.846	7.290	
Tanah dan Bangunan	3.808		
Logistik Acara	3.156	4.247	
Sub Jumlah	29.654	27.469	
Beban Langsung			
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 15, 16, 17, 18 dan 19)	88.538	79.090	
Gaji dan Tunjangan	71.550	60.484	
Alih Daya	71.269	74.260	
Pajak Hiburan	63.750	63.178	
Telepon, Listrik dan Air	39.340	44.386	
Penyelenggaraan Pertunjukan	29.605	19.563	
Pemeliharaan	25.684	19.299	
Alat Kerja dan Operasi	11.500	9.544	
Sewa	4.161	2.370	
Jasa Layanan Aplikasi	3.714	6.404	
Perjalanan dan Survei	2.763	2.915	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar)	1.577	1.665	
Sub Jumlah	413.451	383.158	
Jumlah	443.105	410.627	

## 33. Beban Penjualan dan Umum dan Administrasi

	30 September	
	2024	2023
Beban Penjualan		
Promosi dan Penjualan	24.637	16.349
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji dan Tunjangan	78.304	69.381
Pajak Bumi dan Bangunan	50.975	50.470
Imbalan Kerja (Catatan 27)	17.687	12.933
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 15, 16, 17, 18 dan 19)	8.447	7.498
Humas dan Jamuan Tamu	6.601	4.210
Jasa Profesional	4.973	3.780
Asuransi	4.783	4.294
Telepon, Listrik dan Air	2.617	2.393
Pemeliharaan	1.927	2.508
Perjalanan dan Survei	1.810	
Alih Daya	1.595	2.694
Fasilitas Karyawan	1.553	1.215
Administrasi Bank	1.123	1.394
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp900 Juta)	1.377	2.639
Sub Jumlah	183.772	165.409
Jumlah	208.409	181.758

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 34. Pendapatan Lainnya

	30 September		
	2024	2023	
Amortisasi Pendapatan Diterima			
di Muka Ancol Beach City (Catatan 41.b)	7.100	7.100	
Klaim Asuransi	2.533	5.918	
Pemulihan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	310	2.383	
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp500 juta)	2.960	7.929	
Jumlah	12.903	23.330	

## 35. Beban Lain - Lain

	30 September		
	2024	2023	
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	16.105	6.498	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar)	2.222	7.752	
Jumlah	18.327	14.250	

## 36. Beban Keuangan

	30 September		
	2024	2023	
Bunga Bank	53.166	46.861	
Bunga Obligasi	16.567	20.782	
Bunga Liabilitas Sewa	4.952	5.971	
Amortisasi Biaya Emisi	1.672	635	
Jumlah	76.357	74.249	

## 37. Laba Per Saham

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	30 September		
	2024	2023	
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang	100.595	170.801	
Beredar (Catatan 2.ab)	1.599.999.996	1.599.999.996	
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	63	107	

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada dampak dilusian pada perhitungan laba per saham.

### 38. Dividen dan Cadangan Umum

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 23 tanggal 23 Februari 2024 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar 21,77% dari laba bersih tahun buku 2023 atau sebesar Rp32 (dalam rupiah penuh) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp51.200 yang telah dibayarkan di tahun 2024 dan menetapkan tambahan cadangan umum sebesar Rp2.352.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## 39. Sifat Transaksi dan Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

### Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Bank DKI (Bank DKI)	Entitas yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI	Penyimpanan Uang dan Pinjaman Bank
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu Pemda DKI	Pemanfaatan Lahan
PT Jaya Kuliner Lestari	Entitas Asosiasi	Piutang Usaha
PT Arkonin	Entitas yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham Perusahaan, yaitu PT Pembangunan Jaya	Penagihan Jasa Konstruksi
Manajemen Kunci	Pengendali Kegiatan Perusahaan	Tantiem dan Bonus

Persentase Terhadap Jumlah Aset,

Saldo dan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut :

			Liabilitas, Pendapatan dan Beban		
	30 September 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp	30 September 2024 %	31 Desember 2023 %	
Kas dan Setara Kas (Catatan 3)					
Bank					
PT Bank DKI	13.124	10.143	0,00	0,00	
Deposito Berjangka					
PT Bank DKI	115.035	355.000	0,03	0,09	
Jumlah	128.159	365.143	0,04	0,10	
Piutang Usaha (Catatan 4)					
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	1.917	8.577	0,00	0,00	
PT Bank DKI	59	382	0,00	0,00	
PT Jaya Kuliner Lestari	737	572	0,00	0,00	
Sub Jumlah	2.712	9.531	0,00	0,00	
Aset Lain-lain (Catatan 19) Deposito Berjangka					
PT Bank DKI Dana Dibatasi Penggunaannya	2.500	2.500	0,00	0,00	
PT Bank DKI	1.406	7.332	0,00	0,00	
Utang Usaha (Catatan 20)					
PT Arkonin	840	840	0,00	0,00	
Jumlah	840	840	0,00	0,00	
Utang Bank (Catatan 23)					
PT Bank DKI	243.788	658.115	0,07	0,18	
Jumlah	243.788	658.115	0,07	0,18	
Pendapatan (Catatan 31) PT Jakarta Propertindo (Perseroda)		6.814		0,00	
PT Bank DKI	668	719	0.00	0,00	
Jumlah	668	7.533	0,00	0,00	

Transaksi dengan pihak berelasi terutama merupakan pengadaan atau penyediaan jasa subkontraktor/ supplier. Pengadaan ini diselenggarakan oleh Perusahaan dengan mengadakan tender yang pesertanya adalah pihak ketiga dan pihak berelasi yang terdaftar dalam daftar rekanan Perusahaan. Mekanisme pengadaan sesuai dengan standar pengadaan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris pada periode 30 September 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp9.045 dan Rp6.131.

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Direksi pada periode 30 September 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp19.442 dan Rp12.282.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan ini.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

### 40. Segmen Operasi

Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini membagi segmen operasi sesuai dengan produk dan jasa kegiatan usahanya yaitu: pariwisata, real estat serta perdagangan dan jasa. Kelompok-kelompok tersebut menjadi dasar pelaporan segmen informasi.

Kegiatan utama kelompok tersebut terdiri dari:

Pariwisata : Mengelola kawasan wisata, pertunjukan keliling dan penginapan wisata

Real Estat : Pembangunan, penjualan dan penyewaan properti

Perdagangan dan Jasa : Penjualan barang dagangan, jasa sarana transportasi laut dan

pengelolaan restoran dan air bersih

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:

		30	September 2024	4	
	Pariwisata	Real Estat	Perdagangan dan Jasa	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan dari Pelanggan Eksternal	658.737	155.897	169.080	(102.268)	881.446
Hasil					
Hasil Segmen	(368.819)	(37.952)	(93.712)	86.123	(414.360)
Beban Langsung tidak dapat Dialokasikan				_	(28.745)
Laba Bruto					438.341
Penghasilan Bunga Penghasilan Lainnya Beban Umum dan Administrasi Beban Penjualan Kerugian Selisih Kurs Beban Lain-lain					14.211 12.903 (183.772) (24.637) (329) (18.327)
Jumlah Beban Usaha				-	(199.951)
Rugi Sebelum Pajak dan Beban Keuangan					238.390
Beban Pajak Final				-	(19.027)
Beban Keuangan					(76.357)
Bagian Laba Bersih Investasi Ventura Bersama Bagian Rugi Bersih					(326)
Entitas Asosiasi					734
<b>Rugi Sebelum Pajak</b> Beban Pajak Penghasilan					<b>143.414</b> (43.479)
Rugi Bersih Tahun Berjalan				·-	99.935
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak				_	
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan				_	99.935
Kepentingan Non-pengendali					(660)

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September 2024				
	Pariwisata	Real Estat	Perdagangan dan Jasa	Eliminasi	Jumlah
Aset	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Segmen Aset yang Tidak Dapat Dialokasi	2.007.265	1.272.241	166.462	(2.520.079)	925.890 2.701.771
Total Aset					3.627.661
<b>Liabilitas</b> Liabilitas Segmen	447.958	523.776	16.629	(506.512)	481.851
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi					1.428.835
Total Liabilitas					1.910.686
Pengeluaran Modal					122.780
Penyusutan dan Amortisasi					93.770
Beban Nonkas selain Penyusutan dan Amortisasi Tidak Dapat Dialokasikan					17.687
		24	l Desember 2023		
	Pariwisata	Real Estat	Perdagangan dan Jasa	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan dari Pelanggan Eksternal	1.010.077	131.464	141.623	(9.330)	1.273.834
Hasil					
Hasil Segmen	499.952	46.520	49.598	8.818	604.889
Beban Langsung tidak dapat Dialokasikan					(1.181.772)
Laba Bruto					696.951
Penghasilan Bunga					23.775
Penghasilan Lainnya					33
Kerugian Selisih Kurs - Bersih Beban Penjualan					(250.260) (28.331)
Beban Umum dan Administrasi					(551)
Beban Lain-lain					(98.246)
Jumlah Beban Usaha					(249.739)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan				,	447.212
Beban Pajak Final Beban Keuangan					(16.981) (96.369)
Bagian Rugi Bersih Investasi Ventura Bersama					(763)
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi					24.016
<b>Laba Sebelum Pajak</b> Beban Pajak Penghasilan					<b>357.115</b> (115.809)
Laba Bersih Tahun Berjalan				•	241.306
Kerugian Komprehensif Lain Setelah Pajak					(87.595)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan					153.711
Kepentingan Non-pengendali				•	(6.117)
					,- '/

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2023				
	Pariwisata	Real Estat	Perdagangan dan Jasa	Eliminasi	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset					
Aset Segmen	2.064.720	1.329.696	213.880	(2.508.554)	1.099.742
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi					2.643.678
Total Aset					3.743.420
Liabilitas				•	
Liabilitas Segmen	483.883	559.700	77.512	(397.132)	723.963
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi					1.351.217
Total Liabilitas					2.075.180
Pengeluaran Modal					199.889
Penyusutan dan Amortisasi					92.306
Beban Nonkas selain Penyusutan dan Amortisasi Tidak Dapat					
Dialokasikan					18.726

Grup tidak menyajikan segmen geografis karena seluruh usaha Grup terkonsentrasi pada satu lokasi di Ancol, Jakarta Utara.

## 41. Perjanjian dan Informasi Penting Lainnya

- a. Berdasarkan Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Wilayah Kotamadya Jakarta Utara No. 02/PPT/JU/111/95 tanggal 16 Maret 1995, tanah yang digunakan untuk jalan tol yang termasuk dalam HPL No. 1 milik Perusahaan adalah seluas 143.574 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp92.842. Selisih perhitungan nilai antara Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara tersebut dengan dana ganti rugi yang diterima Perusahaan yaitu sebesar Rp16.582 belum dicatat sebagai pendapatan Perusahaan, karena menurut manajemen Perusahaan:
  - 1. Secara yuridis formal, sisa tagihan belum dapat dikategorikan sebagai piutang Perusahaan karena penentuan jumlah nilai seluruh ganti rugi dilakukan secara sepihak oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pluit Cilincing (Harbour Road) Kotamadya Jakarta Utara. Tidak ada perjanjian kesepakatan jumlah ganti rugi yang melibatkan Perusahaan selaku entitas usaha berbadan hukum, sehingga secara validitas, tidak ada dasar bagi Perusahaan untuk mengakui sisa tagihan ganti rugi sebagai piutang maupun pendapatan;
  - Ditjen Binamarga dengan suratnya No. T.10.100.06.06/729 tanggal 22 September 1999 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, memohon untuk mempertimbangkan agar sisa kekurangan pembayaran ganti rugi dapat diselesaikan tanpa ganti rugi, mengingat hal-hal berikut:
    - Kondisi keuangan negara saat ini dan ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cenderung semakin terbatas, dan
    - Prasarana publik yang dibangun di atas tanah Perusahaan juga memberikan manfaat yang sangat besar terhadap pengembangan proyek Perusahaan.

Berdasarkan surat Perusahaan No. 048/DIR-PJA/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 kepada Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Perusahaan telah meminta realisasi atas kekurangan ganti rugi yang belum diterima. Sampai dengan tanggal laporan ini, penyelesaian selisih tersebut masih dalam proses.

b. Pada tanggal 10 Agustus 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS) untuk membangun, mengalihkan serta mengelola hak atas sarana music stadium di area Perusahaan seluas 39.000 m². PBCS memiliki hak pengelolaan atas proyek tersebut selama 25 tahun. Setelah masa perjanjian berakhir, PBCS akan mengembalikan pengelolaan kepada Perusahaan. PBCS memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan maksimal 25 tahun atas persetujuan tertulis Perusahaan. Atas kerjasama tersebut, Perusahaan berhak mendapatkan imbalan sebesar 5% dari sewa jangka panjang dan 6% dari sewa jangka pendek yang

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

merupakan bagian dari pendapatan kotor setiap tahunnya. Apabila PBCS terlambat melaksanakan penyerahan atas pembagian hasil transaksi penjualan maka dikenakan denda keterlambatan yang besarnya denda ditentukan berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) tahun dari 3 (tiga) bank pemerintah terkemuka.

Pada tanggal 26 April 2007, melalui Akta Notaris No. 208 dari Sutjipto S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah memberikan persetujuan kepada PBCS untuk mengalihkan kerjasama kepada PT Wahana Agung Indonesia (WAI), sebagai perusahaan afiliasi PBCS, yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pengalihan.

Pembagian pendapatan yang disetujui berdasarkan perjanjian adalah:

- Pendapatan yang bersumber dari sewa jangka panjang pihak ketiga yaitu sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan bruto;
- Pendapatan yang bersumber dari sewa jangka pendek dari pihak ketiga yaitu 6% (enam persen) dari pendapatan bruto, dan
- WAI wajib melakukan pembayaran minimal ke Perusahaan sebesar Rp3.250 pada tahun pertama pengoperasian dan untuk tahun berikutnya dengan kenaikan minimal 5% (lima persen) per tahun, pembayaran tahun pertama sudah diterima.

Sehubungan keterlambatan pembangunan fisik sehingga mundurnya pelaksanaan pengoperasian proyek secara keseluruhan, maka dengan itikad baik Perusahaan, WAI dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) sepakat membuat Perjanjian Pengalihan Kerjasama Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian "Music Stadium" dari WAI ke WAIP yang tertuang dalam perjanjian tertanggal 28 Agustus 2009, selanjutnya proyek tersebut akan dilakukan oleh WAIP dan dijadwalkan dapat diselesaikan tanggal 30 Nopember 2010 untuk proyek sisi utara dan 31 Juli 2011 untuk proyek sisi selatan. Pada tanggal 29 Agustus 2011 dilakukan addendum I (pertama) mengenai penyelesaian proyek di sisi Utara yang semula tanggal 30 Nopember 2010 menjadi 29 Agustus 2011 dan dari 31 Juli 2011 menjadi 29 Desember 2011 untuk sisi selatan. Pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan addendum II (kedua) mengenai penyelesaian proyek dari 29 Agustus 2011 untuk sisi utara dan 28 Desember 2011 untuk sisi selatan, menjadi 20 Desember 2012 untuk pengalihan proyek secara parsial dan 31 Juli 2013 untuk pengalihan proyek secara keseluruhan.

Kemudian Perusahaan melakukan berita acara serah terima secara parsial Pengalihan dan Pengoperasian Bangunan Music Stadium masing-masing melalui Berita Acara (BA) No. 021/DIRPJA/XII/2012 - 001/BA/DIR-WAIP/ XII/2012 dan No. 020/DIR-PJA/XII/2012 - No. 002/BA/DIRWAIP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan secara keseluruhan Pengalihan dan Pengoperasian Bangunan Music Stadium masing-masing melalui Berita Acara (BA) No. 003/DIR-PJA/VII/2013 - No. 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 dan No. 004/DIR-PJA/VII/2013 - 004/BA/DIR-WAIP/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dengan ini perusahaan sepakat dan setuju untuk menyerahkan bangunan tersebut untuk dioperasikan oleh WAIP selama 25 tahun.

- c. Kelanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berada di kawasan Ancol mengalami penyesuaian dengan adanya perencanaan ulang penataan ruang kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sehingga kemudian dilakukan penyesuaian terhadap izin-izin reklamasi yang sebelumnya telah diterbitkan dan diperoleh Perusahaan. Izin-izin reklamasi baru yang diperoleh Perusahaan setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas menjadi sebagai berikut:
  - Izin Prinsip Reklamasi Pulau I dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1275/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 202,5 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 994/-1/794.2 tanggal 7 September 2015.
  - Izin Prinsip Reklamasi Pulau J dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1276/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 316 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 995/-1.794.2 tanggal 7 September 2015.
  - Izin Prinsip Reklamasi Pulau K dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1295/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 32 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 540/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014. Bahwa kemudian terhadap izin prinsip Pulau K tersebut telah terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada Perusahaan pada tanggal 17 November 2015.

- Izin Prinsip Reklamasi Pulau L dengan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1296/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 481 Ha.

Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui jumpa pers di Balaikota Jakarta secara resmi mengumumkan pemberhentian proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pencabutan izin-izin reklamasi yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk izin-izin reklamasi yang diperoleh Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas. Terhadap keputusan pemberhentian tersebut, kemudian Perusahaan menerima surat keputusan pencabutan terhadap izin-izin reklamasi yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:

- 1. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 Perihal Pencabutan:
  - a) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1276/-1.794.2 (Pulau J);
  - b) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1296/-1.794.2 (Pulau L);
  - c) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1275/-1.794.2 (Pulau I).
- 2. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1410 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur No. 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada Perusahaan.

Bahwa Perusahaan kemudian melakukan koordinasi intensif kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas rencana kerja Perusahaan kedepannya. Rencana kerja tersebut kemudian disampaikan oleh Perusahaan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat No. 011/DIR-PJA/EXT/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang rencana pengembangan ikon Dunia Fantasi dengan melakukan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi melalui pembangunan wahana Ocean Fantasi yang terintegrasi dengan wahana Dunia Fantasi eksisting dan rencana perluasan kawasan rekreasi kawasan Taman Impian pada area Ancol Timur. Melalui surat yang sama, terhadap rencana kerja tersebut kemudian Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menerbitkan izin prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian pada area Ancol Timur seluas ± 120 Ha.

Bahwa berdasarkan persetujuan prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha berdasarkan surat Gubernur DKI Jakarta tanggal 24 Mei 2019 Nomor 462/-1.711.511 dan berdasarkan surat Perusahaan Nomor 010/DIR-PJA/EXT/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan, pada tanggal 24 Februari 2020 diterbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha, yang pada intinya memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha kepada Perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan sebelum pelaksanaannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas pengembangan kawasan ancol tersebut di atas dan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 13 September 2023 Perusahaan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 13092310513100010 seluas 202.95 Ha yang diterbitkan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan. Izin sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melanjutkan pengurusan izin pengembangan kawasan ancol selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

d. Berikut ini adalah pihak yang signifikan terkait dengan perjanjian sewa dan sponsorship:

Entitas	Pihak	Periode Kontrak	Bagi Hasil	Nilai Kontrak	Pendapatan 30 Sep 2024
PJA	PT Pertamina Gas	2014 - 2039	Penyewaan Lahan	76.977	2.309
PJA	PT Pertamina Gas	2016 - 2041	Penyewaan Lahan	72.418	2.173
PJA	PT Perusahaan Gas Negara	2015 - 2040	Penyewaan Lahan	72.418	2.173
TIJA	PT Sinar Sosro	2022 - 2025	Kerjasama Promosi dan Penjualan	46.468	10.320
PJA	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	2019 - 2029	Penyewaan Lahan	41.500	3.113
PJA	PT Perusahaan Gas Negara	2013 - 2038	Penyewaan Lahan	40.325	1.210
TIJA	PT Fauna Land Ancol	2016 - 2035	Penyewaan Lahan	24.500	967
PJA	PT Indosat Tbk	2020 - 2025	Penyewaan Lahan	20.620	3.093
TIJA	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2023 - 2026	Kerjasama Promosi dan Penjualan	13.046	3.261
PJA	PT Ketrosden Triasmitra	2012 - 2032	Penyewaan Lahan	6.665	208

e. Berikut ini adalah pihak yang signifikan terkait dengan perjanjian sewa berdasarkan persentase bagi hasil:

Entitas	Pihak	Periode Kontrak	Presentase Bagi Hasil	Pendapatan 30 Sep 2024
TIJA	PT Djamanmas Pangan Nusa	2014 - 2024	6%	7.068
TIJA	PT Rekso Nasional Food	2015 - 2025	15%	4.139
TIJA	PT Arif Cipta Mandiri	2023 - 2028	20%	3.692
TIJA	PT Jimbaran Jaya	2024 - 2033	20%	3.109
TIJA	PT Nusa Prima Pangan	2023 - 2028	15%	2.676
TIJA	PT Lit Seribu Drums	2022 - 2027	10%	2.431
TIJA	PT Kalaha Tan	2020 - 2025	25%	1.752
TIJA	PT Prima Usaha Era Mandiri	2023 - 2025	10%	680
TIJA	Simpang Raya	2023 - 2026	11%	533

f. Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan tanah/lahan di Kawasan Ancol untuk Penyelenggaraan Acara/Event dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor X/DIR-PJA/XI/2021 pada tanggal 17 November 2021 dengan jangka waktu kerjasama penggunaan lahan dalam perjanjian tersebut selama 3 tahun, adapun penggunaan area obyek pemanfaatan dalam jangka waktu tersebut mengikuti kalender acara penyelenggaraan event sesuai penggunaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam jangka waktu tersebut.

#### 42. Perkara Hukum

- a. Pada tanggal 25 Oktober 2022, PT Arkindo (selaku Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 25 Oktober 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap:
  - 1. PT Taman Impian Jaya Ancol (PT TIJA) (selaku Tergugat I);
  - 2. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perusahaan) (selaku Tergugat II);
  - 3. PT Bank DKI c.q. Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan (selaku Turut Tergugat I);
  - 4. PT Jamkrida Jakarta (selaku Turut Tergugat).

Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada kontrak Nomor: 001/P/DIR-TIJA/PP/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Masjid Apung Ancol ("Kontrak") dimana PT Arkindo (Penggugat) sebagai kontraktor/penerima pekerjaan dan PT TIJA (Tergugat) sebagai pemilik proyek/pemberi pekerjaan dengan jenis Kontrak turnkey (putar kunci) yang merupakan kontrak mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal kontraktor/penerima pekerjaan setuju untuk membangun proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek siap dioperasikan. PT Arkindo (Penggugat) wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Juni 2022.

Dalam pelaksanaannya sampai dengan batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan sesuai Kontrak, PT Arkindo (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Masjid Apung Ancol secara penuh dan tuntas sampai dengan pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen) sesuai dengan batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan yang diatur di dalam Kontrak, yaitu pada tanggal

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

15 Juni 2022, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak PT TIJA melakukan pembatalan Kontrak terhadap PT Arkindo pada tanggal 15 Juni 2022 dengan segala konsekuensi akibat pembatalan Kontrak ditanggung oleh PT Arkindo sesuai ketentuan yang diatur di dalam Kontrak.

Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2022 dan tercatat dengan nomor register perkara 709/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. panggilan sidang (relaas) diterima masing-masing oleh PT TIJA dan PT PJA dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 15 November 2022.

Pada tanggal 4 Desember 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara 709/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat (PT Arkindo), kuasa hukum Tergugat I (PT TIJA), kuasa hukum Tergugat II (PT Bank DKI c.q. Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan), kuasa hukum Turut Tergugat II (PT Jamkrida Jakarta), yang amar putusannya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

### **Dalam Pokok Perkara**

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Veerklaard).
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Veerklaard).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.153.000 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu Rupiah) (dalam rupiah penuh);

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, secara daring melalui e-court, PT Arkindo selaku Pembanding (d/h Penggugat) telah mengajukan permohonan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.709/Pdt.G/2021/PN.JKT.Utr tersebut di atas, yang kemudian diberitahukan kepada PT Taman Impian Jaya Ancol selaku Terbanding I (d/h Tergugat I) dan Perusahaan selaku Terbanding II (d/h Tergugat II) pada tanggal 20 Desember 2023 dan kemudian tercatat dengan nomor register perkara No. 245/PDT/2024/PT DKI.

Pada tanggal 21 Maret 2024, kuasa hukum Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor No. 245/PDT/2024/PT DKI tanggal 19 Maret 2024 melalui *e-court* yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor No. 245/PDT/2024/PT DKI yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) (dalam rupiah penuh);

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperoleh informasi bahwa PT Arkindo telah mengajukan pernyataan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan nomor 245/PDT/2024/PT DKI juncto nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr pada tanggal 4 April 2024. Pada tanggal tanggal 14 Mei 2024, kuasa hukum Perusahaan dan PT TIJA menerima relaas pemberitahuan pernyataan kasasi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 245/PDT/2024/PT DKI juncto nomor 709/Pdt.G/2022

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

yang kemudian diikuti relaas pemberitahuan penyerahan memori kasasi nomor 245/PDT/2024/PT DKI juncto nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT Arkindo telah menyerahkan memori kasasi tertanggal 17 April 2024 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 April 2024, yang untuk selanjutnya Perusahaan dan PT TIJA telah menanggapi memori kasasi PT Arkindo tersebut melalui kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2024 yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

### **Pendapat Hukum**

Gugatan Penggugat (PT Arkindo) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Veerklaard) pada putusan pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian terhadap putusan tersebut dikuatkan dalam putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga Perusahaan menjadi pihak yang dimenangkan dalam pemeriksaan pada dua tingkat putusan pengadilan sebelumnya tersebut dengan tetap memperhatikan bahwa sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses kasasi, sehingga terhadap perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

## Dampak Keuangan

Sampai dengan laporan ini disampaikan, tidak terdapat dampak keuangan apapun bagi laporan keuangan Perusahaan atau Grup mengingat perkara ini masih dalam tahap proses kasasi, sehingga terhadap perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

b. Pada tanggal 5 April 2023, PT Mata Elang Internasional Stadium (PT MEIS) (selaku Penggugat) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) (selaku Tergugat) dan Perusahaan (selaku Turut Tergugat). Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada perjanjian sewa menyewa antara PT WAIP (pihak menyewakan) dan PT MEIS (pihak penyewa) sebagaimana yang dinyatakan dalam akta Notaris Edison Jingga, SH. No. 78 tanggal 21 Maret 2012 tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Agustus 2015 juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2430 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 juncto Putusan Peninjauan Kembali nomor 547 PK/Pdt/2018 tanggal 24 Agustus 2020.

Bahwa kedudukan Perusahaan dalam gugatan ini adalah karena adanya perjanjian *Build Transfer Operate* (BTO) antara Perusahaan dengan PT WAIP, dimana setelah selesai masa pembangunan proyek BTO, PT WAIP memiliki hak mengoperasikan proyek BTO tersebut, termasuk menyewakan kepada pihak ketiga, dalam perkara ini pihak ketiga dimaksud adalah PT MEIS.

#### Nilai Gugatan:

Dalam perkara ini tidak ada nilai gugatan yang ditujukan oleh Penggugat

Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 April 2023 dan tercatat dengan nomor register perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. Relaas panggilan sidang diterima oleh Perusahaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus tanggal 13 April 2023.

Pada tanggal 20 September 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. yang diucapkan dalam sidang terbuka yang amar putusannya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut untuk seluruhnya.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## **Dalam Pokok Perkara**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
- 2. Menyatakan segala bentuk perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiel dalam perkara aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan kerugian materiel dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000 (dalam rupiah penuh);
- 4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pada tanggal 29 September 2023, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta, PT WAIP telah mengajukan pernyataan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023, melalui *e-court*, kuasa hukum Perusahaan telah menerima *scan* putusan perkara nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023 yang kemudian diikuti dengan pemberitahuan memori banding dan berkas memori banding yang diajukan oleh PT WAIP selaku Pembanding (d/h Tergugat I) pada tanggal 19 Oktober 2023 yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan penyerahan kontra memori banding oleh Perusahaan selaku Turut Terbanding (d/h Turut Tergugat) pada tanggal 26 Oktober 2023. Bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut kemudian tercatat dengan nomor register 1195/PDT/2023/PT DKI.

Pada tanggal 4 Januari 2023, kuasa hukum Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 1195/PDT/2023/PT DKI tanggal 20 Desember 2023 melalui *e-court* yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor 1195/PDT/2023/PT DKI yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (dalam rupiah penuh);

Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperoleh informasi bahwa PT WAIP telah mengajukan pernyataan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. juncto nomor 1195/PDT/2023/PT DKI pada tanggal 10 Januari 2023. Bahwa terhadap upaya hukum kasasi tersebut kemudian tercatat dengan nomor register 2706 K/PDT/2024.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, kuasa hukum Perusahaan telah mendapatkan informasi melalui situs Perkara Mahkamah Agung, dimana Majelis Hakim perkara kasasi nomor 2706 K/PDT/2024 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 20204 dengan amar Kabul. Bahwa sampai dengan laporan ini disampaikan Perusahaan masih menunggu salinan resmi putusan tersebut sesuai dengan keterangan pada situs Perkara Mahkamah Agung bahwa salinan putusan sedang dalam proses minutasi oleh Majelis.

### Pendapat Hukum

Dengan telah diputusnya perkara pada tingkat kasasi dengan amar Kabul, maka permohonan kasasi yang dimohonkan PT WAIP terhadap putusan perkara yang dimenangkan PT MEIS pada 2 (dua) tingkat pemeriksaan sebelumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan perkara tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun demikian Perusahaan masih menunggu salinan resmi putusan kasasi untuk mengetahui isi putusan dan pertimbangan dari Majelis Hakim secara utuh dan lengkap.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

## Dampak Keuangan

Tidak terdapat dampak keuangan apapun bagi laporan keuangan Perusahaan atau Grup terhadap putusan perkara ini mengingat tidak ada nilai tuntutan atau gugatan yang ditujukan oleh Penggugat (PT MEIS) kepada Perusahaan dalam gugatan perkara ini, terlebih perkara telah diputus pada tingkat kasasi dengan amar Kabul, sehingga permohonan kasasi yang dimohonkan PT WAIP terhadap putusan perkara yang dimenangkan PT MEIS pada 2 (dua) tingkat pemeriksaan sebelumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan terhadap perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

c. Pada tanggal 04 Juli 2024, PT Jaya Kuliner Lestari ("PT JKL") selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap salah satu anak usaha Perseroan, yaitu PT Taman Impian Jaya Ancol ("PT TIJA") selaku Tergugat.

Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan antara PT TIJA dan PT JKL terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor: 002/DIR-TIJA/RS/XI/2018 tentang Kerjasama Sewa Non Fixed Pengelolaan Restoran "Talaga Sampireun" di Areal Allianz Ecopark - Taman Impian Jaya Ancol atas nilai revenue sharing dengan pembayaran minimum (minimum payment) yang berlaku pada masa pandemi Covid-19, dimana pada masa pandemi Covid-19 PT TIJA memberlakukan kebijakan relaksasi kepada seluruh mitra kerja sama PT TIJA di dalam Kawasan Taman Impian Java Ancol dimana kebijakan tersebut mengatur untuk mitra kerja sama sewa non fixed dengan mekanisme revenue sharing dengan pembayaran minimum (minimum payment) hanya dikenakan nilai persentase revenue sharing tanpa pembayaran minimum (minimum payment) untuk berlaku terbatas dalam periode 1 Maret 2022 sampai dengan 30 April 2022. Bahwa kemudian dalam keadaan masa pandemi berangsur pulih kembali menuju kondisi normal, PT TIJA menyampaikan pemberitahuan kepada semua mitra kerja sama bahwa per tanggal 01 Mei 2022 mekanisme pembayaran mulai diberlakukan normal kembali sesuai kontrak kerja sama masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, PT JKL menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan kepada PT TIJA agar tidak dikenakan pembayaran minimum (minimum payment) atas sewa lahan, namun demikian PT TIJA menyatakan tidak menyetujui permohonan tersebut yang kemudian diikuti dengan serangkaian korespondensi di antara kedua belah pihak yang pada pokoknya PT JKL lebih lanjut memohon keringanan atas nilai pembayaran minimum (minimum payment) yang diikuti dengan evaluasi yang dilakukan oleh PT TIJA atas berjalannya kegiatan usaha restoran Talaga Sampireun yang dilakukan PT JKL, namun demikian sampai dengan berakhirnya Perjanjian Talaga Sampireun pada tanggal 30 November 2023 dan adanya pemeriksaan oleh lembaga terkait berwenang atas pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Talaga Sampireun belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

## Nilai gugatan:

Ganti Rugi Materiil Rp512.600.000,- (lima ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) (dalam rupiah penuh) yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diperhitungkan sebagai pengurangan utang Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Juli 2024 dan tercatat dengan nomor register perkara 400/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr. Relaas panggilan sidang diterima oleh PT TIJA dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 08 Juli 2024.

### Pendapat Hukum

Sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terhadap perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## Dampak Keuangan

Sampai dengan laporan ini disampaikan, tidak terdapat dampak keuangan apapun bagi laporan keuangan Grup mengingat perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan dalam persidangan di

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terhadap perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

d. Pada tanggal 05 Juli 2024, salah satu mantan pekerja Perseroan selaku Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Perseroan bersama dengan stakeholders terkait lainnya selaku Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan diajukan Penggugat terkait berakhirnya hubungan kerja Penggugat dengan Perseroan berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Nomor: 002/HCAGA-PJA/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan pejabat berwenang terkait Perseroan yang kemudian telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2024 dan kemudian telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 3924/Bip/PHI/2024/PN.Jkt.Pst. yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktortat Jenderal Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Nilai Gugatan:

- Ganti Rugi Materiil Rp1.655.864.315 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) (dalam rupiah penuh).
- Ganti Rugi Immateriil Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) (dalam rupiah penuh).

Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Juli 2024 dan tercatat dengan nomor register perkara 408/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr. Relaas panggilan sidang diterima oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 10 Juli 2024.

## Pendapat Hukum

Sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terhadap perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## Dampak Keuangan

Sampai dengan laporan ini disampaikan, tidak terdapat dampak keuangan apapun bagi laporan keuangan Perusahaan atau Grup mengingat perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terhadap perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## 43. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen risiko Perusahaan adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh personil Perusahaan sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa atau keadaan yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan korporasi dan mengelola risiko tersebut agar masuk dalam *risk appetite* (risiko yang dapat diterima) Perusahaan untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan manajemen risiko, Perusahaan melakukan identifikasi, penaksiran, respon, pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atas risiko Perusahaan.

- 1. Risiko keuangan utama yang harus dikelola adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar yang terdiri dari risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.
  - i. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari kegagalan pelanggan memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut (rincian umur piutang usaha). Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 piutang usaha Perusahaan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan cara melakukan seleksi pelanggan, bank dan institusi keuangan serta penetapan kebijakan cara pembayaran penjualan dan pengalihan risiko dengan penutupan asuransi, mengusahakan penyandang dana untuk pelanggan.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

	30 September 2024		31 Desember 2023	
_	Nilai Tercatat Exposure Maksimum		Nilai Tercatat	Exposure Maksimum
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	269.015	269.015	411.446	411.446
Piutang Usaha	51.461	39.843	62.237	62.237
Investasi Jangka Panjang Lainnya	128.936	128.936	128.936	128.936
Jumlah Aset Keuangan	449.412	437.794	602.619	602.619

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Grup telah mencatat penyisihan penurunan nilai atas penurunan piutang usaha yang telah jatuh tempo (Catatan 4).

Aset keuangan yang belum jatuh tempo yang terindikasi risiko kredit terutama dari kas dan setara kas dan piutang usaha.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana di bank, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.

Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang belum jatuh tempo tidak memiliki risiko kredit yang signifikan, karena piutang usaha atas penjualan unit properti, dijamin dengan properti yang sama, dimana jumlah eksposure risikonya lebih rendah dari nilai jaminannya, sedangkan piutang usaha nonproperti berasal dari pelanggan-pelanggan yang memiliki rekam jejak yang baik.

## ii. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perusahaan diharapkan dapat membayar seluruh liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Agar dapat memenuhi liabilitas tersebut, Perusahaan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut merangkum liabilitas keuangan Perusahaan per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak pembayaran yang tidak didiskontokan:

	30 September 2024					
Liabilitas	Tidak ditentukan	< 1 Tahun	> 1 - 5 tahun	Biaya Emisi	Nilai Tercatat	
Utang Usaha dan Lain-lain		27.757			27.757	
Beban Akrual	193.545				193.545	
Utang Bank			250.000	(6.212)	243.788	
Utang Obligasi			568.460	(3.815)	564.645	
Jaminan Pelanggan						
dan Deposit lainnya	19.913				19.913	
Liabilitas Sewa		4.785	82.424		87.209	
Jumlah	213.458	32.542	900.884	(10.027)	1.136.857	

	31 Desember 2023					
Liabilitas	Tidak ditentukan	<u>&lt; 1 Tahun</u>	> 1 - 5 tahun	Biaya Emisi	Nilai Tercatat	
Utang Usaha dan Lain-lain		27.589			27.589	
Beban Akrual	218.363				218.363	
Utang Bank		41.280	624.720	(7.885)	658.115	
Utang Obligasi		65.432	149.568	(219)	214.781	
Jaminan Pelanggan						
dan Deposit lainnya	13.397				13.397	
Liabilitas Sewa		3.126	97.079		100.205	
Jumlah	231.760	137.427	871.367	(8.104)	1.232.450	

### iii. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut.

## 2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.

Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Grup. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik (*systematic risk*) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh *variable* yang terlibat, sehingga membuat kinerja menurun, bahkan diversifikasipun belum mampu menghilangkan risiko ini.

### 3. Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	30 September 2024		31 Desember 2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan Bank	269.015	269.015	411.446	411.446
Piutang Usaha	51.461	39.843	62.237	62.237
Aset Lain-lain	7.080	7.080	11.131	11.131
Total	327.556	315.938	484.814	484.814

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September 2024		31 Desember 2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha dan Lain-lain	27.757	27.757	27.589	27.589
Utang Bank	243.788	243.788	658.115	658.115
Beban Akrual	193.545	193.545	218.363	218.363
Total	465.090	465.090	904.067	904.067

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

### 44. Manajemen Permodalan

Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Liabilitas neto dibagi modal yang disesuaikan. Liabilitas neto merupakan total liabilitas (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham dan saldo laba).

Rasio liabilitas terhadap modal yang disesuaikan pada 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Jumlah Liabilitas	1.910.686	2.075.180
Dikurangi Kas dan Setara Kas	(269.015)	(411.446)
Liabilitas Bersih	1.641.671	1.663.734
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1,696,555	1.647.160
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	96,76%	101,01%

#### 45. Informasi Tambahan untuk Arus Kas

Perusahaan memiliki transaksi non kas untuk 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	30 September 2024	31 Desember 2023
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Lain-lain	1.136	9.454
Penambahan Investasi Jangka		
Panjang Lainnya Melalui Reklasifikasi		
Investasi pada Entitas Asosiasi		265.669
Jumlah	1.136	275.123

Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel dibawah ini menunjukan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

	30 September 2024				
	Saldo Awal	Arus Kas	Perubahan Non Kas	Saldo Akhir	
Utang Bank	658.115	(416.000)	1.673	243.788	
Utang Obligasi	214.781	349.421	443	564.645	
Liabilitas Sewa	100.205	(8.570)	(4.426)	87.209	
	31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Arus Kas	Perubahan Non Kas	Saldo Akhir	
Utang Bank	901.704	(242.870)	(719)	658.115	
Utang Obligasi	214.543	·	238	214.781	
Liabilitas Sewa	101.654	(12.376)	10.927	100.205	

## 46. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim. Laporan keuangan konsolidasian interim telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 11 Oktober 2024.